

45

# EUFEMISME DALAM PERS INDONESIA

## Suatu Pendekatan Sociolinguistik



**Skripsi**  
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Sastra  
pada Jurusan Linguistik Fakultas Sastra  
Universitas Hasanuddin

Oleh

**NASRUDDIN**  
84 07 071

PERPUSTAKAAN POS-1 UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. diterima	27-08-93
Ang. dlm.	-
Ang. volume	2 (dua) eks
Isi	Hasrat
No. registrasi	257402 45
No. kas	

**FAKULTAS SASTRA**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**UJUNG PANDANG**  
1992

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS SASTRA

Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor /PTO 4.H5.FS/C/1989 tanggal 1989 dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.

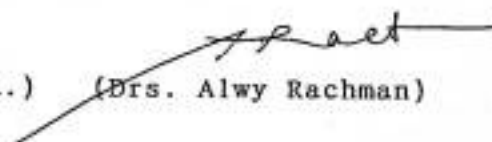
Ujung Pandang, 5 Maret 1992

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

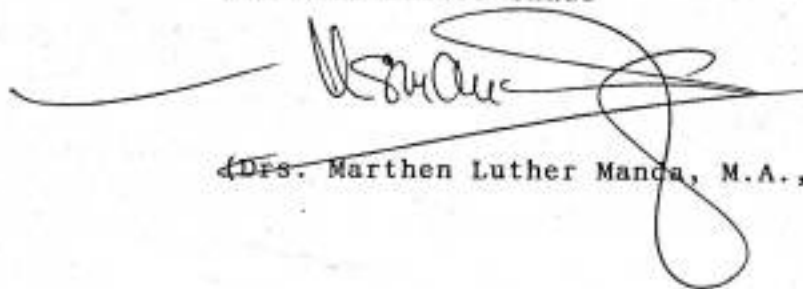


(Prof. Dr. R. Soewondo Atmodarsono, M.A.)



(Drs. Alwy Rachman)

Disetujui untuk diteruskan  
kepada Panitia Ujian Skripsi  
Dekan,  
u.b. Ketua Jurusan Linguistik  
Fakultas Sastra Unhas



(Drs. Marthen Luther Manca, M.A., M.Phil.)

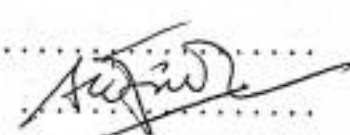
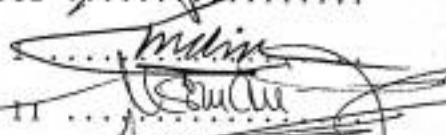

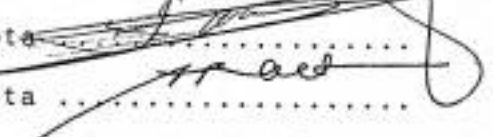
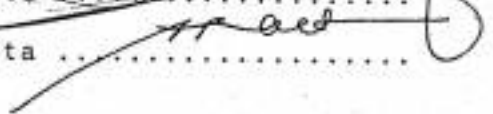
UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS SASTRA

Pada hari ini ..... tanggal ..... 199  
panitia ujian skripsi menerima dengan baik skripsi yang  
berjudul : "EUFEMISME DALAM PERS INDONESIA: Suatu Pendekatan  
Sosiolinguistik". Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah  
satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra  
pada jurusan Linguistik Fakultas Sastra Universitas  
Hasanuddin.

Ujung Pandang, 14 Maret 1992

Panitia Ujian Skripsi

- |                                  |                  |   |
|----------------------------------|------------------|---|
| 1. Prof:Dr.Nadjamuddin;M.Sc:...  | Ketua .....      |  |
| 2. Drs: Abdul Majid Djuraid .... | Sekretaris ..... |   |
| 3. Drs: Nurdin Langgole; M.S: .. | Penguji .....    |  |
| 4. Drs: M.L: Manda; M.A.; M.Phil | Penguji II ..... |  |
| 5. Prof:Dr: R: Soewondo; M.A: .. | Anggota .....    |  |
| 6. Drs: Alwy Rachman .....       | Anggota .....    |  |

Karya ini saya persembahkan kepada  
kedua orang tua tercinta  
Muh. Budiman (Bapak)  
Saniah (Ibu)

Motto:

Hidupku adalah Ibadah  
Karyaku adalah Ibadahku  
Ibadahku adalah Karyaku

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas isin-Nya sehingga karya ini dapat selesai sesuai dengan rencana semula. Karya ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi strata satu Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Saya menganggap ada beberapa hal yang perlu dijelaskan kepada pembaca sebelum memasuki isi karya ini.

Dalam karya ini, telah dibahas mengenai eufemisme dalam pers Indonesia, sebagai salah satu bentuk pengungkapan sebuah gagasan yang saya anggap hal penting dalam berinteraksi. Salah satu bentuk interaksi secara verbal adalah media massa atau pers. Penelitian yang saya gunakan dalam pengumpulan data melalui pers. Saya memilih pers sebagai sumber data karena pers alat penyebar informasi.

Selama penyusunan karya ini, saya mengalami berbagai kendala, tetapi yang sangat dirasakan adalah masalah eufemisme belum ada yang telah membahas secara terinci dalam bentuk buku teks. Saya hanya mengumpulkan berbagai bahasan yang sangat karena pada umumnya hanya membahas secara singkat. Dengan bahasan yang telah dikumpulkan dari berbagai versi tentang eufemisme, inilah yang menjadi landasan teori dalam pembahasan ini. Dari sebab inilah sehingga proses penulisan menyita waktu cukup lama karena sekitar empat tahun tidak terhitung proses kuliah. Bahkan saya berusaha untuk mencari literatur di berbagai perpustakaan di Indonesia.

Saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk berkarya yang terbaik. Oleh karena itu, saya tidak menutup kemungkinan untuk menerima saran-saran dari berbagai pihak dengan harapan agar bisa lebih melengkapi karya ini. Dengan demikian, tidak berlebihan kalau saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu dalam penyelesaian karya ini dan sekaligus dalam proses studi strata satu pada Jurusan Linguistik, Fakultas Sastra, Universitas Hasanuddin. Tanpa mengurangi rasa terima kasih kepada orang-orang yang saya tidak cantumkan namanya pada lembaran ini karena keterbatasan halaman khusus untuk kata pengantar ini. Nama-namanya sebagai berikut:

1. Budiman dan Saniah sebagai orang yang telah melahirkan saya dan selalu setia dan sabar membina anaknya hingga penyelesaian studi ini.
2. Prof.Dr. R. Soewondo Atmodarsono, M.A. dan Drs. Alwy Rachman sebagai pembimbing pertama dan kedua selama penulisan skripsi ini.
3. Dr. Nadjamuddin, M.sc. sebagai Dekan Fakultas sastra Universitas Hasanuddin.
4. Drs. M.L. Manda, M.A., M.Phill. dan Drs. Abdul Majid Djuraid sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Linguistik Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
5. Para dosen yang selama ini membina saya dalam proses studi yang tidak sempat disebut satu persatu.

6. Teman-teman seperjuangan dalam menempuh studi seperti Drs. Takuddin Rahimi, Syarifuddin Rabbi, Dra. Gusnawati, Dra. Sitti Rabiah, Wahyuddin dan Amiruddin.
7. Teman-teman "Gorilla" kampus seperti Drs. Arsunan Arsin, Ir. Ancha A. Rachman, Abraham, Hidayat Hafid, Budi Amin, Drs. Sudirman Pattang.
8. Teman-teman penghuni Dangko 4, pengurus Kopma dan anggota pasukan "Kurdi".
9. Masih banyak teman-teman lain yang tidak sempat disebut namanya satu persatu.

Dari sekian banyak yang telah berjasa kepada saya selama studi dan pada akhirnya, saya hanya mampu berterima kasih dan mengembalikan kepada Allah SWT. sebagai penolong Yang Maha Agung dan dapat membalas jasa-jasa baik hamba-Nya. Amien.

Makassar, Pebruari 1992

Penulis



## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENERIMAAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Alasan Memilih Judul .....	1
1.2 Masalah dan Batasan Masalah .....	7
1.3 Hipotesis .....	9
1.4 Tujuan Penulisan .....	9
1.5 Metodologi .....	10
1.6 Sistematika Penulisan .....	15
BAB II DESKRIPSI TENTANG EUFEMISME, PERS DAN SOSIO- LINGUISTIK .....	17
2.1 Eufemisme .....	17
2.2 Pers Indonesia .....	21
2.2.1 Religuitas .....	23
2.2.2 Etnisitas .....	24
2.2.3 Urbanisme .....	25
2.2.4 Industrialisme .....	26
2.2.5 Ekonomisme .....	27

	xi
2.2.6 Politikisme .....	27
2.2.7 Intelektualisme .....	28
2.2.8 Seksisme .....	39
2.2.9 Budaya Muda .....	30
2.2.10 Familisme .....	31
2.2.11 Olahraga .....	31
2.3 Sociolinguistik .....	33
2.4 Kesimpulan .....	36
 BAB III EUPFEMISME DALAM PERS INDONESIA .....	 39
3.1 Pendahuluan .....	38
3.2 Fungsi Kalimat .....	40
3.3 Fungsi Kata .....	52
3.4 Kesimpulan .....	57
 BAB IV BENTUK-BENTUK EUPFEMISME .....	 59
4.1 Pendahuluan .....	59
4.2 Kritikan .....	60
4.3 Apologi .....	64
4.4 Retorika .....	67
4.5 Tabu .....	71
4.6 Penghormatan .....	73
4.7 Kesimpulan .....	76
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN .....	 79
5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Saran-Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83

#### ABSTRACT

This work is intended to discuss about the use of euphemism in Indonesian press. It widely discusses some ways in which euphemism are used. That is, the use of particular words in soft or cultural way. It also discusses the acceptance of euphemism in human interaction or even in human communication.

To deal with this issue, a sociolinguistic approach is deliberately employed. It characterizes the use of euphemism in particular condition in relation to the function of language in society. In addition, the data collected are displayed and are interpreted in a very descriptive way.

The result of the analysis suggests three things. First, the use of euphemism may occur in the form of word and sentence. Second, euphemism is obviously used in the form of criticism apology, and in rhetorical expression. Finally, it is also used by intellectual, journalist, bureaucrat, and by leaders.

BAB I  
PENDAHULUAN



1.1 Alasan Memilih Judul

Bahasa adalah salah satu kebutuhan utama manusia sebagai alat komunikasi antara sesama manusia dalam bermasyarakat. Bahasa tidak terlepas dari sistem sosial budaya masyarakat (Siregar, 1988: 3). Oleh karena itu, bahasa dapat dipandang sebagai suatu indikator untuk menjelaskan hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Lewat bahasa suatu ide atau gagasan dari individu disampaikan kepada individu lain dalam berinteraksi. Bahasa juga merupakan identitas suatu bangsa, etnis dan suku. Untuk bangsa Indonesia terbukti sejak tanggal 28 Oktober 1928 hingga sekarang. Segenap bangsa Indonesia bersepakat bahwa bahasa Indonesia (BI) sebagai salah satu alat pemersatu bangsa Indonesia.

Bahasa juga mencerminkan sistem sosial-budaya. Hal ini dapat dilihat lewat sejarah atau naskah tulisan dan lisan yang biasanya menuruti nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya bangsa. Seperti telah ditegaskan oleh Moerdiono bahwa untuk menyampaikan sebuah kritik atau gagasan seharusnya berdasar pada prinsip kemanusiaan yang adil beradab (Moerdiono, 1988: 10). Dalam kaitan ini, Harmoko mengutip pendapat Colin Cherry, juga menyatakan bahwa komunikasi pembentuk

satuan sosial yang terdiri dari individu-individu melalui penggunaan 'bahasa' dan 'tanda', memiliki kebersamaan dalam peraturan-peraturan terhadap berbagai aktivitas untuk pencapaian tujuan (Harmoko, 1988:3).

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa selalu saja ada peluang membahas bahasa dari berbagai sudut pandang. Pemahaman bahasa pada umumnya dilakukan melalui pendekatan linguistik. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu kajian khusus mengenai ilmu bahasa. Oleh karena itu, batasan pengertian linguistik perlu dipaparkan dalam pembahasan ini.

Pengertian linguistik menurut Kridalaksana (1983: XXVIII) mencakup dua bidang yaitu 'mikrolinguistik' dan 'makrolinguistik'. Mikrolinguistik adalah ilmu linguistik yang membidangi (1) teori linguistik, (2) linguistik Deskriptif (3) linguistik historis komparatif; Makro-linguistik membidangi dua bagian pokok adalah interdisipliner dan terapan. Bidang interdisipliner antara lain (1) fonetik, (2) stiliktika (3) filsafat bahasa, (4) psikolinguistik (5) sociolinguistik, (6) etnolinguistik, (7) filologi, (8) semiotika, (9) efigrafi, (10) paleografi; Bidang terapan antara lain (1) pengajaran bahasa, (2) penerjemahan, (3) leksikografi, (4) pembinaan bahasa Internasional, (5) pembinaan bahasa khusus, (6) linguistik medis, (7) grofologi dan (8) mekanolinguistik.

Pengertian lain seperti yang diungkapkan oleh Alwasilah (1985: 56), linguistik adalah ilmu pengetahuan yang menjadi objek formalnya bahasa, baik lisan maupun tulisan yang memiliki ciri-ciri pemerlain dengan syarat-syarat: semiotik, rasional, empiris, umum, sebagai pemerian dari kenyataan struktur, pembagian, bagian-bagian dan aturan bahasa. Kesimpulannya, linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, baik lisan maupun tulisan.

Titik berat tulisan ini dirujuk pada kajian sociolinguistik, dengan fokus pengungkapan eufemisme dalam pers sebagai pendekatan sociolinguistik. Sebagaimana batasan pengertian menurut Harimurti di atas yang menyatakan bahwa sociolinguistik adalah bagian dari kajian interdisiplin. Sociolinguistik adalah kajian tentang bahasa dan sosial (Hudson, 1986:3). Jadi studi yang dimaksudkan dalam karya ini adalah suatu studi tentang pendayagunaan bahasa dalam suatu masyarakat. Di sinilah salah satu fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Fungsi yang dimaksudkan tentunya erat kaitanya antara makna, maksud dan informasi dalam suatu proses komunikasi (Verhaar, 1979: 131).

Kemampuan komunikatif penutur bahasa ditentukan oleh berbagai faktor. Siregar (1988:8) berpendapat bahwa kemampuan komunikatif terdiri atas:

1. Pengetahuan tentang struktur dan kosa kata bahasa;
2. pengetahuan tentang tata cara berbicara dan sopan santun berbahasa;
3. mengetahui bagaimana cara mengemukakan dan menyebut beraneka ragam tindak ujaran;
4. mengetahui bagaimana penggunaan bahasa yang tepat.

Penulis merujuk kepada uraian Verhaar (1979: 131) dan Siregar (1988: 8) tentang komunikatifnya suatu ujaran atau gagasan dalam berkomunikasi di mana penutur berada, apa maksud dan bagaimana mengungkapkannya. Hal ini tentunya disesuaikan dengan situasi yang bagaimana, topik pembicaraan dan kapan. Jadi pada dasarnya dalam berinteraksi harus memperhatikan struktur atau strata sosial lingkungannya.

Strata sosial sangat dipengaruhi oleh keragaman nilai budaya bangsa, seperti bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang mengakar pada bangsa Indonesia dengan sumber nilai yang disepakati adalah Pancasila. Negara Pancasila mengakui berbagai agama yang menjadi tuntunan hidup manusia. Dengan demikian, prilaku dan nilai yang dikembangkan bersumber pada agama yang dianut oleh masing-masing pemeluknya. Di samping dituntun oleh keragaman nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang terikat pada agama masing-masing, prilaku dan nilai yang juga terikat oleh perangkat UUD Negara. Issu tentang

eufemisme dalam pers seringkali dikaitkan dengan masalah kebebasan berpendapat.

Secara normatif, dalam UUD 45 juga diterangkan tentang kebebasan mengeluarkan pendapat, termasuk di dalamnya berpendapat atau mengeluarkan kritik melalui pers. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia kita diberi kebebasan untuk menyampaikan kritik.

Salah satu agama yang mayoritas di Indonesia adalah agama Islam membolehkan adanya kritik. Tentunya kritik yang dimaksudkan harus mengikuti aturan yang tertera dalam Alqur'an (Q.S. 16:125). Bunyi aturan tersebut:

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى  
هى احسن .

Suruhlah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat (bijaksana) dan pelajaran yang baik serta bantahlah dengan cara yang baik (eufemisme).

Hamka (1965: 155) berpendapat bahwa kata 'hikmat' dalam kalimat tersebut menunjukkan bentuk penyampaian yang bijaksana (eufemisme) dan harus pula beraqal-budi yang mulia, lapang dada dan hati yang bersih. Frase selanjutnya bantahlah dengan 'cara yang baik'; maksudnya adalah menyampaikan kritik dengan cara yang baik (eufemisme). Bahasa yang baik harus mengacu pada etika dan moral dengan dasar keberterimaan isi gagasannya. Dari sudut ini, penulis berpendapat bahwa Pandangan



eufemisme yang berdasarkan atas etika dan moral dalam konteks pendekatan agama Islam tentunya positif. Jadi, kritik yang berdasarkan atas agama tidak bertendensi negatif, tetapi berorientasi pada nilai-nilai kebenaran.

Alasan lain penulis dalam memilih eufemisme sebagai kajian adalah belum ditemukannya dalam bentuk buku teks khusus yang membahas topik ini. Pembahasannya lebih banyak tersebar dalam bentuk artikel yang telah ditulis oleh para ahli, baik ahli sosial maupun ahli linguistik itu sendiri. Misalnya, Ignas Kleden telah menulis dalam majalah *Prisma* nomor 11, Desember 1978 yang berjudul "Eufemisme Bahasa, Konsensus Sosial dan Kreativitas Kata"; wawancara Taufik Abdullah pada harian *Kompas* pada tanggal 29 Juni 1988 yang berjudul "Eufemisme dalam Pernyataan Politik, Pertanda Budaya Politik dikuasai Oleh Pejabat"; harian *Masa Kini* pada tanggal 31 Oktober 1988 yang berjudul "Gejala Eufemisme oleh Pejabat Menciptakan Pola Pikir ABS"; Umar Kayam pada mingguan *Tempo* pada tanggal 27 Agustus 1988; dan masih banyak ulasan lain tentang hal tersebut yang penulis tidak menyebutkannya.

Selain itu, terdapat sejumlah buku-buku yang telah membahasnya antara lain: Leech, *Semantics*, hal. 53-56; *Principles of Pragmatics*, hal. 147-151; Palmer, *Semantics* hal. 72, 92; Parret (ed.), *Possibilities and Limitations of Pragmatics*, hal. 143, 764, 770-771;

Tannen, *Coversation Style*, hal. 12,13; Ullman, *Semantic*, 2, 150, 187, 204-9, 228, 231, 39, 71, 72, 187-8, 260; Wardhaugh, *How Conversation Works*, hal. 55, 111, 11; Trudgill, *Sociolinguistics*, hal. 29-32, 86-90; Wardhaugh, *Introducton to Sociolinguistics*, hal. 229-232; Bloomfield dalam *Language*, hal. 401. Pembahasan tersebut telah menunjukkan bahwa eufemisme selama ini tersebar dalam berbagai buku teks, seperti penulis nyatakan sebelumnya.

Setelah penulis membaca berbagai literatur mengenai eufemisme. Ternyata kajian ini cukup menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini penulis memilih judul "Eufemisme dalam Pers Indonesia: Suatu Pendekatan Sociolinguistik".

## 1.2 Masalah dan Batasan Masalah

Eufemisme studi tentang penggunaan bahasa yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya pemakai bahasa tertentu, termasuk bahasa pers (bahasa jurnalistik). Hal ini berarti bahwa bahasa yang digunakan oleh pers terikat pada etika dan moral. Agar kajian ini lebih komprehensif, penulis mempermasalahkannya dengan memperhatikan keterkaitan antara struktur budaya tertentu dan fakta-fakta empiris bahasa yang digunakan dalam pers. Masalah yang harus dijawab dalam pembahasan ini antara lain:

1. Bagaimana eufemisme dalam pers Indonesia?
2. Siapakah yang lebih dominan menggunakannya dan dalam keadaan bagaimana?
3. Bagaimana keterkaitan antara bentuk penghalusan dengan budaya bangsa Indonesia.

Ketiga pertanyaan tersebut dijadikan dasar terhadap pembatasan pembahasan sebagai berikut:

1. Aspek-aspek yang menyangkut kajian linguistik, khususnya bidang interdisipliner.
2. Aspek sosial sebagai pendekatan dalam pembahasan ini, khususnya mengenai bentuk-bentuk eufemisme dalam pers dengan keterkaitannya antara pembaca dan hal diberitakan.

### 1.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian terdahulu, penulis beranggapan bahwa penggunaan eufemisme terkait pada sejumlah hal, antara lain:

1. Eufemisme dalam penuturan bahasa Indonesia sangat terkait dengan status sosial pemakainya.
2. Kemampuan menggunakan eufemisme sangat terkait dengan kemampuan menggunakan diksi dalam berkomunikasi. Diksi yang dimaksudkan adalah penuturan bahasa dalam pers.

3. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang yang menyebabkan sikap kritis dan analisis masyarakat semakin meningkat pula. Akibatnya, pranata sosial masyarakat dan nilai-nilai etika serta moral turut berubah. Dengan demikian penggunaan eufemisme dalam pers pun berubah.

#### 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis membahas masalah ini antara lain:

1. Mencoba memaparkan penggunaan eufemisme dalam pers sebagai wahana penyebar informasi. Abad sekarang ini adalah abad informasi menurut Alvin Tofler. Siapa yang menguasai pers akan menguasai dunia.
2. Tulisan ini dimaksudkan untuk memaparkan penggunaan eufemisme pada masyarakat yang berstatus sosial tertentu.
3. Selain butir 1,2, penulisan ini juga sebagai salah satu syarat penyelesaian studi program strata satu Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

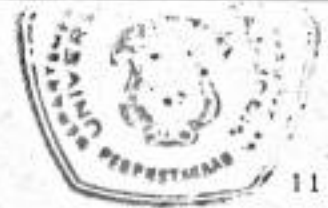
#### 1.5 Metodologi

Validitas suatu penelitian ditentukan oleh metode yang digunakan. Untuk menentukan validnya hasil penelitian, ada dua sifat umum penelitian yaitu bersifat *kualitatif* dan *kuantitatif*. Penelitian yang bersifat

kuantitatif adalah penelitian yang akan menggunakan data statistik dalam metode analisisnya. Bogdan dan Toyler (dikutip oleh Aminuddin, 1990: 14) memberikan definisi tentang penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam pembahasan ini, penulis akan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif. Mengenai pengertian tentang penelitian yang bersifat kuantitatif tidak dibahas karena kedua sifat penelitian masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dikutip Aminuddin, 1990: 14-18) adalah (1) *natural setting* yang maksudnya adalah sumber data langsung dan peneliti sebagai instrumen kunci; (2) lebih mengutamakan proses penelitian daripada hasilnya; (3) bersifat deskriptif; (4) analisa data secara induktif; (5) *makna* atau *meaning* merupakan perhatian utamanya desain bersifat sementara; (7) pengambilan sampel secara purposif dan hasil yang dinegosiasikan oleh metode kualitatif itu sendiri. Penjelasan lebih lanjut menurut Bogdan dan Biklen antara lain:

- 1) *Natural Setting* sebagai suatu sumber data penelitian kualitatif yang dikumpulkan langsung dari lingkungan



nyata atau autentik dalam situasi sebagaimana adanya menurut ruang dan waktu. Penelitian semacam ini dilakukan dengan pengamatan yang menggunakan waktu cukup lama. Ruang yang dimaksud di sini adalah batas lingkungan penelitian seperti di sebuah sekolah dan tempat-tempat lain di mana subjek melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan alat perangkat seperti camera, Video, buku tulis, pencatat, rekaman dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. *Natural setting* sebagai fenomena-fenomena yang dipelajari dan memperlihatkan maknanya secara penuh dalam konteks alamiah. Peneliti mendatangi *setting* tertentu dengan memperhatikan konteksnya. Penelitian semacam ini adalah penelitian yang langsung ke lapangan di mana jadi objek penelitian dan sekaligus hadir penelitinya.

Penelitian semacam ini yang manusia sebagai instrumen mempunyai beberapa keuntungan antara lain:

- a. Responsif, manusia dapat merasa dan merespon;
- b. Adaptif, manusia selalu menyesuaikan diri di mana berada;
- c. Holistic manusia dapat memahami keseluruhan konteks;
- d. Memungkinkan perluasan pengetahuan secara langsung;

- e. Memungkinkan pemerosesan data segera sehingga dapat menggunakan hipotesis di lapangan;
  - f. Kesempatan untuk melakukan klasifikasi suatu peringkasan data sewaktu masih di lapangan;
  - g. Kesempatan untuk mencari respon yang empati.
- 2) Lebih mengutamakan proses daripada hasil. Peneliti lebih menitikberatkan perhatiannya terhadap gejala dan proses daripada *product* atau *hasilnya*. Misalnya, peneliti lebih memperhatikan bagaimana orang-orang bertukar pikiran untuk memperoleh pengertian yang sama tentang sesuatu yang didiskusikan. Peneliti lebih memfokuskan perhatiannya bagaimana suatu 'notion' berkembang menjadi *common sense*. Dari mana *common sense* tersebut? Penekanan pendekatan kualitatif dengan proses yang sangat menguntungkan dalam penelitian pendidikan. Pendidikan dalam artian formal dan tidak formal.
- 3) Penelitian kualitatif bersifat deskriptif adalah penelitian yang datanya terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar bukan angka-angka. Tulisan hasil penelitian berisi kutipan-kutipan dari kumpulan data untuk memberikan ilustrasi dan mengisi materi laporan. Penelitian kualitatif berangkat dari suatu asumsi bahwa tiada suatu yang remeh di dunia ini. Setiap gejala tentang apa yang dipelajari penting. Dalam hal ini tidak berarti bahwa penelitian

kuantitatif ada yang tidak penting dalam pengumpulan datanya.

- 4) Analisis secara induktif menuntun peneliti tidak khusus mencari data untuk memperkuat atau menolak hipotesis yang telah diajukan sebelum memulai penelitian. Tetapi peneliti melakukan abstraksi setelah rekaman fenomena-fenomena khusus pengelompokan data. Teori ini dikembangkan dari bawah yang berasal dari sejumlah besar bukti yang terkumpul. Bukti-bukti tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Teori ini disebut *grounded theory*. Masalah yang sering dihadapi oleh peneliti dengan menggunakan teori ini adalah keterbatasan waktu.

Kalau seorang peneliti akan mengembangkan suatu teori tentang apa yang akan diteliti, perlu arah yang dapat diikuti sebagai landasan pengembangan teori tersebut. Teori yang dimaksudkan bertujuan agar peneliti cepat mendapatkan gambaran setelah mengumpulkan data. Analisis data dalam penelitian semacam ini dilaksanakan terus menerus sejak pengumpulan data di lapangan sampai penulisan laporannya.

- 5) *Meaning* adalah makna esensial untuk mendapat perhatian dalam penelitian kualitatif. Peneliti cenderung memusatkan perhatiannya kepada apa yang disebut *participant perspective*. Peneliti memfokuskan



perhatiannya terhadap pertanyaan tentang asumsi-asumsi apa yang diyakini oleh orang-orang yang berlainan kehidupan mereka; apa yang mereka ikuti begitu saja. Analisis data kualitatif untuk menemukan *meaning* atau makna. Hal ini dapat ditempuh dengan memulai pemecahan dan penemuan pola-pola yang ada pada data sampai kepada pembuatan *conceptual coherence*.

- 6) Desain bersifat sementara yang dapat dikembangkan terus menerus selama pengumpulan data di lapangan. Desain semacam ini tergantung pada konteks. Makna menjadi esensi dalam dalam penelitian. Fokus penelitian baru dapat ditetapkan setelah cukup lama bekerja di lapangan.
- 7) Pengambilan sampel secara *purposif*, yang mensyaratkan maksud pengumpulan data dilakukan secara simultan dan hasilnya dinegosiasikan oleh peneliti. Hal ini sangat berkaitan dengan *Grounded Theory*.

Uraian Bagdan dan Biklen di atas menjadi dasar dalam penelitian pada pembahasan ini. Lebih khusus lagi peneliti menggunakan metode ini karena objek penelitiannya adalah salah satu aspek kajian linguistik. Kajian yang dimaksud adalah *Eufemisme dalam Pers Indonesia: Suatu pendekatan Sosio-linguistik*.

Abdul Wahab (dikutip oleh Aminuddin, 1990: 126) berpendapat bahwa dalam penulisan makalah, skripsi dan disertasi bersifat argumentatif. Hal yang dimaksudkan di sini *probable truth*, bukan *absolut truth* karena yang tidak mutlak itulah yang mutlak. Hal yang mutlak adalah sifatnya abadi, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sedangkan dunia keilmuan yang sifatnya argumentatif sangat terbatas pada ruang dan waktu. Kebenaran semacam ini hanya berdasarkan fakta-fakta empiris. Oleh karena penulisan ini hanya mengacu pada fenomena-fenomena yang muncul sebagai gejala kebahasaan dalam pers Indonesia, pengumpulan data pada penelitian yang dilaksanakan hanya menggunakan alat perangkat buku catatan dan pensil atau polpen. Tidak menggunakan camera, tape-recorder karena analisis yang digunakan hanya melalui teks pada media massa atau pers.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam membahas suatu permasalahan, penulis menganggap bahwa sistematika pembahasan perlu dipaparkan terlebih dahulu. Dalam pembahasan ini terdiri dari lima (5) bab yang antara lain:

Bab I Pendahuluan, bab ini membahas mengenai latar belakang, masalah, batasan masalah, hipotesis, metodologi dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

- Bab II Deskripsi tentang Eufemisme, Pers dan Sosiolinguistik yang membahas secara teoritis tentang masalah yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Gambaran teoritis yang dimaksudkan adalah landasan teori yang digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Landasan teori yang digunakan tentang apa itu eufemisme; bagaimana bentuknya dan kategori apa yang digunakan dalam analisis data. Gambaran singkat tentang pers, pengertian tentang pers, mamfaat pers dan gambaran umum tentang kategori pers itu sendiri. Tentang sosiolinguistik juga sebagai gambaran singkat tentang sosiologi dan linguistik.
- Bab III Eufemisme dalam Pers Indonesia yang menyangkut analisis data dan pembahasan yang diteliti.
- Bab IV Bentuk-Bentuk Eufemisme dalam Pers, dalam bab ini akan dibahas tentang kategori secara linguistik.
- Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan, penutup dan saran-saran.

B A B II  
DESKRIPSI TENTANG  
EUFEMISME, PERS DAN SOSIOLINGUISTIK

2.1 Eufemisme

Sebelum lebih jauh masuk ke dalam pembahasan ini, perlu terlebih dahulu diberi batasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan eufemisme. Eufemisme berasal dari bahasa Yunani *euphemizim* berarti ungkapan pelembut atau pelembutan (Echols and Shadily, 1984:219).

Eufemisme mengacu kepada ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang atau ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan yang mungkin dirasakan menghina (Keraf, 1985: 132). Hal lain, seperti yang diungkapkan oleh Holman (1960: 190) bahwa yang dimaksud eufemisme adalah sebuah bunyi kiasan pada kalimat tidak langsung dengan berupaya menghindarkan hal-hal yang kasar. Hal ini umumnya digunakan oleh beberapa penulis sebagai sebuah usaha menyebutkan suatu ide yang tidak dapat diterima agar dapat diterima oleh penerima gagasan atau penikmat. Pengertian semacam ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Moeliono (1988: 237) yang menyatakan bahwa eufemisme adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti yang dirasakan kasar; dianggap merugikan atau tidak menyenangkan, seperti *kembali kerahmatullah* yang berarti *mati*.

Kridalaksana (1983: 42) berpendapat bahwa eufemisme adalah pemakaian kata atau bentuk lain yang bertujuan untuk menghindari bentuk larangan atau tabu. Pendapat ini sangat mengutamakan hal-hal yang bersifat *tabu* yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat pemakai bahasa tertentu. Pemakai bahasa harus mengetahui budaya masyarakat supaya masyarakat penerima bahasa tersebut dapat menerima gagasan dengan baik. Penulis mencoba memberi contoh dalam bahasa Indonesia yang sering terjadi dialog antara *murid* dan *guru*. Bila murid menyapa gurunya dengan kata *anda*, maka murid tersebut dianggap kurang ajar karena melanggar etika yang berlaku, tetapi kalau menggunakan kata *Bapak* (jika laki-laki). Konteks bahasa yang baku kata *anda* adalah benar, tetapi tidak dianggap baik berdasarkan budaya yang berlaku.

Larson (1989: 121) berpendapat bahwa eufemisme digunakan untuk menghindari ungkapan yang dapat menyinggung perasaan orang, yang tidak diterima secara sosial atau yang tidak menyenangkan. Larson lebih jauh menegaskan bahwa semua bahasa mempunyai *ungkapan eufemistis*, terutama dalam bidang seks, kematian dan adikora. Beliau memberi contoh dengan penggunaan kata *sorga* bagi orang Yahudi untuk menghindari penggunaan Nama *Allah*.

Contoh lain yang dijelaskannya adalah kebanyakan bahasa, seks dirujuk secara eufemistis, misalnya dengan ungkapan *mengenal, memegang, meraba, berkumpul, tidur bersama dst.* Hal ini bisa juga dirujuk secara eufemistis, seperti di Inggris, orang tua sekarang disebut 'penduduk senior'. Di antara orang Chol, Meksiko, bayi yang baru lahir selalu dilekati istilah negatif, misalnya dengan kata jelek. Hal ini dimaksudkan untuk menipu roh halus agar tidak menginginkan bayi tersebut. Bahasa Chontal, hantu disebut *saudara tua*, karena penggunaan nama langsung akan membuatnya mengira ia dipanggil.

Uraian Larson (1989: 121) dan Kridalaksana (1983: 42) sejalan dengan pendapat Susanto (1986:44) tentang analisis sebuah pesan sangat terikat pada unsur kebudayaan sebagai unsur yang menentukan. Hal yang dimaksudkan di sini adalah analisis tentang penggunaan eufemisme.

Ignas Kleden (1987:252), mengutip pendapat Alfian, memberi contoh penggunaan kata *keadilan sosial*. Jika bentuk ini dipakai oleh mahasiswa dalam mengajukan tuntutan, akan berbeda jika pemerintah menggunakannya. Kalau hal semacam ini terjadi, maka terdapat perbedaan pengertian semantik terhadap kata *keadilan sosial*. Dengan demikian, manifestasi dan konsekuensi dari aspek semantik dapat memunculkan konflik sosial.

Eufemisme yang dimaksudkan Alfian adalah bertendensi memaksakan kehendak, tidak sekedar menghaluskan kata-kata agar gagasan tersebut dapat diterima. Hal ini tersirat pada kehendak politik pemerintah agar keinginannya dapat terlaksana dengan menggunakan kata *keadilan sosial*.

Penggunaan eufemisme sangat erat kaitannya dengan pendekatan semantik. Dengan demikian, penggunaan pilihan kata atau diksi berpengaruh terhadap penggunaan hal tersebut. pendapat ini didukung oleh Nababan (1984: 21) tentang penggunaan bentuk-bentuk bahasa. Beliau berpendapat bahwa penggunaan bahasa untuk komunikasi praktis terkait pada makna pesan, atau isi yang disebut ilmu pragmatik atau semantik praktis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud eufemisme adalah suatu cara pengungkapan gagasan baik tertulis maupun lisan kepada pendengar atau pembaca. Tujuannya adalah agar ide tersebut dapat diterima dengan senang hati. Bentuk eufemisme juga dalam penyampaian kehendak atau perintah kepada orang kedua atau orang ketiga dalam berkomunikasi. Berarti eufemisme atau ungkapan eufemistis mengutamakan keberterimaan suatu gagasan.

Dengan adanya gagasan pemerintah melalui Lembaga Bahasa, baik pusat maupun daerah agar selalu

mempromosikan penggunaan bahasa yang *baik* dan *benar*, maka kajian eufemisme layak dikembangkan, terutama eufemisme yang dimunculkan lewat pers. Asumsinya adalah bahasa baku tidak selalu terpahami. Objek penelitian ini adalah eufemisme dalam pers Indonesia.

## 2.2 Pers Indonesia

Tidak lengkap berbicara tentang pers Indonesia, jika dipisahkan dengan manusianya. Dengan demikian Widodo (ed. 1990:1) merumuskan tentang Manusia Indonesia ada tiga ciri pokok, yaitu: (1) serba tahu dan sadar tentang ilmu pengetahuan, (2) kreatif dan (3) solidaritas etis. Lebih lanjut Widodo menjelaskan bahwa sadar ilmu dalam arti bahwa manusia dalam proses belajar tidak pernah selesai. Untuk memacu perkembangan tersebut dibutuhkan kemapanan belajar sepanjang hayat.

Manusia mampu menangkap informasi yang lebih cepat, mampu membuat secara tajam dalam mengantisipasi masa depan; mampu berpikir secara kreatif-integratif-konseptual. Untuk mendukung terlaksananya potensi manusia tersebut dibutuhkan institusi-institusi untuk mendukungnya. Hal yang dimaksud di sini adalah lembaga resmi yaitu pers (media massa).

Pengertian pers menurut Efendy (1989:281) ada dua yaitu: pertama pers dalam pengertian umum, yaitu semua media massa, surat kabar, majalah, buletin, kantor



berita, radio, televisi dan yang mengelolah penerbitan. Kedua, pengertian secara khusus adalah media komunikasi massa cetak yang mengelolah penerbitan. Dengan kata lain, pers berasal dari bahasa Latin *Pressese* artinya sesuatu yang dicetak untuk disebarluaskan.

Dalam pembahasan eufemisme dalam pers, pers dalam artian khusus. Pers adalah naskah atau teks dalam pengertian berita. Analisis teks tertulis lebih mudah dipertanggungjawabkan secara objektif dalam penelitian karena langsung pada teksnya.

Pers berisi berita atau informasi. Dengan demikian bahwa pers hanya sebagai lembaga atau sarana dalam penyebaran berita. Berita dalam artian jurnalistik adalah laporan fakta atau ide yang telah diseleksi oleh staf redaksi untuk disiarkan dan dapat menarik pembaca, entah karena berita luar biasa, entah karena pentingnya, entah karena mencakup *human interest*, seperti humor, emosi dan ketegangan (Assegaff, 1983: 24).

Pengertian lain, menurut Van Hoeve dan Hasan Shadily (1980:452) berita adalah suatu penyampaian mengenai keadaan, kejadian atau peristiwa antara manusia dengan tujuan untuk memberitahukan. Untuk menyampaikan berita yang dimaksudkan melalui wadah penerbitan yang disebut pers. Rumus berita yang memenuhi syarat muat adalah SW+H (what: apa, who: siapa, when: kapan, where: di mana, why: mengapa, dan how: bagaimana).

Van Hove dan Hasan Sadily (1980: 453) selanjutnya menyatakan bahwa berita harus objektif berdasarkan fakta, bukan opini dalam artian analisa dicampuradukkan dengan fakta atau peristiwa. Walaupun demikian wartawan (penulis berita) harus mematuhi kode etik jurnalistik yang berlaku di negara tempat berita disebar. Kode etik pers yang berlaku di Indonesia adalah yang berdasarkan Pancasila. Pers Indonesia sering pula disebut pers Pancasila atau pers bebas dan bertanggungjawab.

Kuntowijoyo (1991: 14) menyatakan bahwa pers Pancasila adalah merupakan kekuatan transformatif dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan berbudaya. Lebih lanjut Kuntowijoyo menjelaskan bahwa pers di Indonesia sekarang ini tampak dalam bentuk: (1) religuitas, (2) etnitas, (3) urbanisme, (4) industrialis, (5) ekonomisme, (6) politikisme, (7) intelektualisme, (8) seksisme, (9) budaya muda, (10) budaya keluarga, (11) budaya wanita, dan (12) olahraga.

Pendapat Kuntowijoyo yang dijadikan dasar dalam uraian tentang pers Pancasila, sebagai berikut:

#### 2.2.1 Religuitas

Dalam dua puluh tahun terakhir kita menyaksikan munculnya pers dengan tema keagamaan. Hal ini tentu saja sebagai akibat adanya pasar yang semakin luas untuk bacaan jenis ini, yang

pada gilirannya juga disebabkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat beragama. Pers keagamaan, terutama pers Islam, muncul dengan rentan yang beragam. Ada majalah dengan tingkat emosional tinggi, seperti Media Dakwah yang penuh dengan pernyataan tentang akidah dan tidak segan-segan menggunakan bahasa yang keras untuk menyatakan ketidaksetujuan. Adapula majalah seperti *Amanah* yang mirip dengan majalah keluarga muslim kelas menengah kota dengan ruangan penuh selera tinggi, keajaiban-keajaiban dan sufisme. Ada Majalah *Ulumul Quran* yang mempunyai kecenderungan intelektualisme. Contoh-contoh ini masih dapat diperbanyak lagi, jika kita mengingat bahwa setiap ormas Islam, bahkan pesantren-pesantren besar, menerbitkan majalahnya sendiri. Juga perlu dicatat di sini majalah, tabloid yang diterbitkan oleh mahasiswa. Sensibilitas keagamaan ternyata telah menambah semaraknya pers nasional kita.

#### 2.2.2 Etnisitas

Ada daerah yang mencoba menggugah sensibilitas etnis yang sehat dengan memelihara tradisi dan bahasa. Untuk menyebut beberapa majalah saja, *Mangle* dalam bahasa Sunda dan *Mekar Sari* serta *Penyebarkan Semangat* dalam bahasa Jawa. Yang menarik



dalam gejala etnisitas adalah masih dilestarikannya ciri-ciri etnis, seperti kisah-kisah makhluk halus dalam cerita-cerita rakyat. Cerita silat juga nampak menonjol pada koran-koran etnis, seperti pada *Yogya Pos*, *Bernas*, dan *Kedaulatan Rakyat* di Yogyakarta. Berita-berita dan iklan sekitar pedukunan dan tabib, sekitar primbon dan astrologi masih banyak dalam koran-koran etnis. Juga ruang budaya banyak menjadi ciri khas pers dengan sensibilitas etnis. Ternyata dalam era pasca nasional pun etnisitas masih mempunyai peranan dalam perkembangan pers nasional.

### 2.2.3 Urbanisme

Perpindahan penduduk dari desa ke kota dan segala konsekuensinya membawa pengaruh penting dalam pertumbuhan pers. Berita-berita sensasional seperti kriminalitas dan kekerasan adalah gejala kekotaan yang menarik pembaca di tingkat bawah.

Harian *Pos Kota* dapat disebut mewakili cita rasa urban bagi kelas bawah demikian, baik dalam sajian maupun dalam format. Juga tabloid seperti *bintang* dan *Citra* mewakili selera kota pada hari-hari santainya. Penerbitan seperti *Santana* yang penuh dengan sensasi nampak seperti mewakili sebuah budaya para proletariat kota yang

menghibur diri dengan membaca tentang kekerasan, perkosaan dan kriminilitas; barangkali sebagai rasa "syukur" bahwa semua yang buruk itu toh tidak menyangkut dirinya. Tentu kita harus juga menyebutkan sensibilitas kota bagi mereka yang mempunyai kedudukan lebih mapan. Majalah semacam *Senang, Selera, Humor*, dan semacamnya tentu bagi mereka yang mempunyai sensibilitas kota. Orang desa tidak akan tertawa membaca humor dalam *Humor*. Meskipun demikian, rupanya kita masih belum sungguh-sungguh melihat adanya media yang patut disebut sebagai urban.

#### 2.2.4 Industrialisme

Sajian tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan industri banyak tersebar dalam koran dan majalah. Komik-komik dengan *science fiction* adalah gejala masyarakat industri. Yang belum banyak terdapat dalam tulisan-tulisan dalam pers nasional kita ialah pengenalan yang sungguh-sungguh tentang sebuah masyarakat industrial. Masalah jarangnyanya berita dan analisis berita yang cerdas mengenai hubungan kapital dan kerja, serta konteks makro dari Industrialisasi, menunjukkan bahwa pers masih belum ada usaha ke arah pendidikan perubahan. Kita senang dengan banyaknya

berita tentang lingkungan hidup yang semakin mendapat perhatian dalam industrialisasi, tetapi kita ingin melihat lebih banyak lagi mengenai sisi sosial budaya dari industrialisasi itu.

#### 2.2.5 Ekonomisme

Budaya ekonomi kita semakin mapan dalam tingkat ekonomi tertentu. Harian *Neraca*, malah *Warta Ekonomi* dan *Prospek* mewakili budaya ekonomi kita. Sejak lama kita sudah mendapat berita-berita ekonomi, tetapi harian dan majalah khusus yang memuat berita dan berita ekonomi baru lahir setelah sekian lama kelas menengah mengharapkannya. Yang menarik dari majalah-majalah itu ialah munculnya tokoh bisnis dalam peredaran dalam pemberitaan, sehingga kisah-kisah sukses pemilik modal dan eksekutif mirip dengan kisah-kisah tentang para politisi di masa lalu. Adalah suatu kemajuan jika tokoh bisnis juga mulai menjadi juru bicara masyarakatnya.

#### 2.2.6 Politikisme

Budaya politik kita rupanya masih belum memulihkan kembali pers politik kita yang pernah subur sebelum 1965. Tema-tema politik memang selalu muncul dalam pemberitaan harian dan maupun majalah, tetapi kita tidak melihat perdebatan

politik yang serius. Pendidikan politik masih terbatas pada mengapresiasi pikiran-pikiran para pejabat negara. Politik luar negeri justru mendapat porsi yang lebih besar daripada berita-berita mengenai perbedaan pandangan politik dalam negeri.

Kebijakan harian atau mingguan memuat berita-berita, seperti cara harian *Merdeka* memberitakan pemberontak Afganistan berlainan dengan harian *Kompas* menyajikan pejuang Mujahidin. Malah seperti *Tempo* dan *Editor* selalu menurunkan tulisan-tulisan politik. Tapi masih merupakan partisipasi daripada pengembangan sebuah misi. Kita masih ingin melihat sebuah penerbitan yang mempunyai cita-cita transformatif, tetapi bukan politikisme seperti masa lalu.

#### 2.2.7 Intelektualisme

Publik pelajar menginginkan sebuah penerbitan yang cerdas. Majalah *Prisma* menjadi kebanggaan mahasiswa, seperti halnya majalah *Ulumul Quran* menjadi kebanggaan intelektual Muslim. Analisa sosial dan budaya yang terpelajar masih jarang kita temukan secara populer. Kita masih belum mempunyai penerbitan seperti *Time Literary Supplement* yang dapat menjadi panduan dalam

perkembangan pemikiran. Meskipun demikian masih banyak terbitan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memprioritaskan kepada perkembangan ilmu pengetahuan.

Penerbitan yang cerdas akan mempunyai dampak positif bagi pendidikan ke arah kemandirian dan kematangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### 2.2.8 Seksisme

Penerbitan yang mengeksploitasi selera seksual, baik yang mulia dan yang rendah, masuk dalam kategori ini. Ada majalah kaum laki-laki seperti *Matra*. Ada majalah wanita yang mewakili budaya wanita seperti *Kartini*, *Femina*, *Sarina*. Di sana akan ada fatwa-fatwa tentang bagaimana laki-laki ideal, wanita ideal mengatasi gangguan seksual, dan sebagainya. Fesyen juga menonjol dalam majalah-majalah ini.

Yang menarik dalam perkembangan sosial bahwa perkara seks, orang Indonesia rupanya sudah mulai terbuka seperti halnya dengan luar negeri. Rubrik-rubrik konsultasi penuh dengan perkara ini. Gejala ini tentu saja tidak terbayangkan sebelumnya, suatu tanda perubahan sensibilitas Indonesia.



### 2.2.9 Budaya Muda

Dahulu pada waktu kita masih hidup dalam masyarakat tradisional, usia mudah dilewatkan dengan tembang-tembang *Dandanggula* yang sama saja lagunya. Sekarang kaum muda menemukan dunia sendiri. Penemuan bahwa kemudaan perlu mendapat perhatian adalah hasil budaya modern. Keluarga kita masa lalu adalah *parent-center family*. Setiap usia mempunyai pers sendiri. Majalah anak-anak *Bobo*, *Ananda*, *Sahabat*, *Tunas Melati* memenuhi meja anak-anak kita. Untuk remaja ada majalah *Hai*, *Kawanku* dan lain-lainnya. Majalah *Estafet* adalah majalah 'gadis' untuk mereka yang berjilbab. Setiap umur mempunyai haknya akan sebuah media. Kita masih belum tahu berapa banyak orang tua harus membayar untuk menyantuni anak-anaknya dengan pers muda ini. Dalam pers kaum muda kita mendapatkan idola yang selalu ditonjolkan adalah para bintang dan olahragawan. Tidak jarang kita temukan mengidolakan Myke Tison, Yuyu Basuki, Maradona, Habibi, Iwan Fals di kalangan anak-anak muda. Harusnya pers berpikir bagaimana mengisi kaum muda dengan impian-impian yang beragam, sehingga pemuda dihadapkan pada pilihan-pilihan yang merdeka, tetapi terarah dalam persiapan menemukan hidupnya sendiri.

#### 2.2.10 Familisme

Bacaan seluruh keluarga, seperti *Keluarga* dan *Minggu Pagi* yang lama nampaknya tergusur oleh spesifikasi-spesifikasi. Rasanya tidak ada majalah yang enak sekeluarga, kecuali majalah *Trubus*, *Serasi*, *Selera*. Suami membelikan majalah istrinya majalah *Kartini*, selain sebagai hadiah juga untuk melirik sampulnya. Tetapi majalah itu tidak cocok untuk anak-anak, karena juga memuat prihal impotensi dan frigiditas.

Rupanya di Indonesia tidak lagi utuh, dipecah-pecah oleh budaya usia. Kita menginginkan sebuah penerbitan yang boleh dibaca segala umur, tanpa harus merasa malu. Atau apakah retaknya keluarga memang sudah terjadi tidak saja terjadi di dunia simbolis seperti media massa, tetapi memang dalam aktualitasnya?

#### 2.2.11 Olahraga

Penerbitan semacam ini sudah banyak mendapat tempat sejak lama. Namun penerbitan khusus olahraga seperti *Bola*, *Tribun* nampaknya masih belum lama. Anak-anak belum mengangkat Ajat Sudrajad atau Yustejo sebagai idolah mereka. Bintang film, penyanyi masih menempati kedudukan paling atas.

Fenomena yang menarik dalam dunia olahraga ialah munculnya politik dan bisnis di dalamnya. Sekarang ini hampir semua cabang olahraga diketuai oleh pejabat atau bisnismen, sehingga olahraga juga melibatkan dua dunia lain, tetapi dalam bentuknya yang santai. Bagaimana Sudomo muncul di padang Golf adalah sebuah berita politik dan olahraga. Bagaimana Bob Hasan mengatur Borobudur 10 K adalah bisnis dan politik. Kita tidak tahu apakah olahraga menggantikan filsafat dan metodologi sebagai sarana legitimasi. Segalak-galaknya Sudomo dalam menangani kasus subversi dan masyarakat asongan, di lapangan Golf dia akan nampak sangat manusiawi. Kekayaan para konglomerat juga menjadi sah karena mengulurkan tangan pada olahraga.

Pers Pancasila seperti yang telah diuraikan oleh Kuntowijoyo adalah sangat beragam. Akibat dari keberagaman pers tersebut menyebabkan adanya pengelompokan masyarakat tertentu berdasarkan minat dan bakat, profesi dan bahkan kelompok umur serta jenis kelamin. Gejala semacam ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia semakin menyadari pentingnya informasi. Pada umumnya strata sosial masyarakat tersebut golongan menengah dan golongan atas.

Uraian mengenai kategori pers Indonesia hanya merupakan gambaran tentang objek penelitian. Tetapi dalam pembahasan ini tidak menggunakan kategori tersebut karena sifat penelitian adalah kualitatif. Penelitian semacam ini tidak terlalu memfokuskan pada banyaknya sampel, tetapi yang penting dapat terwakili.

### 2.3 Sociolinguistik

Sociolinguistik berasal dari kata *Sosiologi* dan *Linguistik*. Kedua gabungan kata ini disebut perpaduan antara dua disiplin ilmu. Istilah ini dalam perkembangannya adalah linguistik 'plus' atau cabang ilmu dalam linguistik yang 'unggul'. Disiplin ilmu ini tampil sebagai interdisiplin yang menggeluti studi bahasa dengan lingkungan masyarakat pemakainya (Hudson, 1986:3).

Melalui kajian ini akan diperjelas bahwa bahasa sebagai cermin masyarakat. Bahasa menunjukkan bangsa. Hal ini dapat dilihat dengan bukti bahwa kelompok masyarakat tertentu menggunakan bahasa tertentu pula. Kelompok inilah yang saling berinteraksi dan pada umumnya memiliki kesamaan tujuan, pandangan dan strata sosial dalam lingkungannya. Dengan demikian pengertian bahasa diletakkan pada sudut pandang sosiologi.

Istilah sosiologi berasal dari bahasa Yunani *Sosius* dan *logos*. Bahasa Inggrisnya adalah *sociology is the systematic study of human institutions and social relations and principles underlying their functioning* (Kellerman, ed. 1972:920). Dengan hubungan ini, menunjukkan bahwa sosiologi adalah studi yang mempelajari hubungan antara manusia dengan manusia, struktur sosial, proses sosial dan perubahan sosial itu sendiri (Alwasilah, 1985: 1). Di sisi lain Alwasilah menyambung bahwa yang dimaksud dengan linguistik adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai objek formal bahasa lisan dan tulisan yang memiliki ciri tersendiri.

Sosiolinguistik sering pula disebut sosilogi bahasa. Di kalangan para ahli, ada yang menyamakan pengertiannya, tetapi ada pula yang membedakannya. Fishman melihat bahwa masyarakat lebih luas pengertiannya jika dibandingkan dengan bahasa. Karena masyarakat menyajikan konteks di segala perilaku yang dikaji (Alwasilah, 1985:3). Perbedaan pendapat dalam hal ini tidak terletak pada akar masalahnya, tetapi titik berat pendekatan yang digunakan.

Di lain pihak Nababan (1984: 3) membagi tiga aspek kajian sosiolinguistik yaitu:

1. Mengkaji bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan.

2. Menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi serta faktor-faktor sosial dan budaya.
3. Mengkaji fungsi-fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat.

Kajian sociolinguistik dapat dibandingkan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Kridalaksana (1983:156) yang menyatakan bahwa sociolinguistik adalah cabang linguistik yang mengkaji hubungan saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku sosial. Kedua pendapat ini searah, hanya Nababan lebih merinci secara sistematis antara hubungan kedua disiplin ini.

Kesimpulannya bahwa yang dimaksud sociolinguistik adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai ciri tersendiri yang objek formalnya bahasa dan masyarakat. Interaksi antara sesama manusia dapat dikaji melalui bahasa yang digunakan dalam masyarakat lingkungan tersebut. Masyarakat dapat berinteraksi melalui simbol-simbol dan tanda-tanda yang disepakati untuk menjadi alat komunikasi antara sesamanya.

Komunikasi baru dapat berhasil jika memiliki norma-norma mengenai simbol-simbol dan referens-referens. Belajar berbicara, membaca dan menulis adalah benar-benar belajar untuk kenal dan menginteraksikan norma-norma mengenai pemakaian simbol-simbol, tatabahasa dan

sintaksis (Newcomb, 1985: 320). Penggunaan simbol-simbol selalu terikat dengan budaya yang berlaku terhadap kelompok masyarakat tersebut.

Lebih lanjut Newcomb (1985: 322) berpendapat bahwa seorang anggota kelompok dapat ikut dalam penerimaan bersama suatu peraturan kalau dapat mengikuti tiga syarat yaitu: (1) Ia harus mengetahui adanya peraturan dalam artian orang lain menerimanya. (2) Ia sendiri harus menerimanya. (3) Ia dan orang lain harus menerimanya. Pendapat ini lebih terfokus pada norma-norma yang berlaku dan dikembangkan oleh masyarakat lingkungannya.

#### 2.4 Kesimpulan

Kesimpulan pembahasan bab yang menyangkut eufemisme ini adalah pers dan sociolinguistik saling terkait. Eufemisme adalah bentuk pengungkapan ide atau gagasan agar ide dapat diterima oleh objeknya. Pers merupakan sarana yang digunakan untuk mengungkapkan ide termasuk penggunaan eufemisme, sedangkan yang dimaksud Sociolinguistik adalah suatu bentuk studi linguistik yang memfokuskan kajiannya kepada bahasa dan masyarakat, termasuk pengungkapan ide melalui pers.

Dengan uraian ini ketiga masalah kajian tersebut di atas menunjukkan koherensi antara satu dengan yang lainnya. Titik koherensinya berada pada keterikatan

terhadap budaya yang berlaku. Eufemisme dapat mencerminkan secara empiris perilaku masyarakat dalam berinteraksi terhadap lingkungannya. Di lain pihak pers yang menjadi wadahnya yang diatur oleh kode etik pers. Kode etik ini yang terikat dengan budaya, baik secara universal dan yang khusus atau budaya lokal. Untuk lebih dalamnya kajian ini dapat dilihat pada bahasan bab-bab berikutnya.



BAB III  
EUFEMISME DALAM PERS INDONESIA

3.1 Pendahuluan

Dalam bab dua, telah dibahas pengertian eufemisme, pers dan sociolinguistik secara teoritis. Oleh karena itu, pada bab ini pembahasan akan dikembangkan berdasarkan data berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Namun demikian tidak berarti bahwa tidak ada yang menyinggung mengenai teori. Hanya saja, teori yang dimaksudkan yang menyangkut batasan pengertian mengenai analisis yang digunakan.

Analisis pada bab ini lebih dititikberatkan pada 'meaning' atau 'makna' dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data itu sendiri dilakukan secara induktif (lih. 1.5). Makna salah satu masalah utama dalam penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Itulah sebabnya, makna 'kata' yang sering ditemukan dalam kajian semantik terbagi dua yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Kedua kajian ini yang dijadikan dasar analisisnya.

Dalam kaitannya dengan penggunaan kata berdasarkan makna gramatikal, menurut Mustansyir (1988: 94) memberikan contoh penggunaan kata 'arti' pada kalimat di bawah ini:

1. Burung perkutut itu mengandung *arti* khusus bagi pak Sastro.
2. Apa *arti* ucapan itu?
3. Lamarannya di PT. A. ditolak, *berarti* ia menjadi penganggur untuk sementara.
4. Rambu lalu lintas itu *berarti* tanda larangan bagi kendaraan bermotor.

Banyak contoh yang bisa diajukan, bahkan sering terjadi adanya pihak yang terjebak dengan makna ungkapan karena dugaan yang salah. Kesalahan dugaan karena tidak memperhatikan struktur kata dan kalimat atau konteksnya. Untuk mengetahui hal yang demikian dibutuhkan kecermatan dalam penerimaan suatu ungkapan. Keempat contoh di atas dapat ditafsirkan berdasarkan Struktur kalimatnya.

Berdasarkan arti kamus, kata *arti* secara leksikal adalah *makna*. Ungkapan contoh pertama kata "arti" khusus bagi Pak Sastro lebih dekat dengan pengertian *nilai* atau *keistimewaan*. Kata *arti* pada kalimat kedua "Apa *arti* ucapan anda?" lebih dekat dengan *maksud* dengan menuntut penjelasan dari lawan bicaranya. Kata *berarti* sudah mendapat awalan *ber-* dengan kata dasar *arti* sudah menjadi kata jadian pada kalimat ketiga ditolak "lamarannya di PT "A" ditolak, *berarti* ia menjadi penganggur untuk sementara" lebih dekat dengan

pengertian *menyebabkan* atau *mengakibatkan*. Sedangkan pada kalimat keempat "Rambu lalu lintas itu *berarti* tanda larangan untuk bagi kendaraan bermotor roda empat". Kata *berarti* di sini lebih identik dengan maksud *sama dengan*. Contoh-contoh di atas dapat dipakai untuk menyimpulkan bahwa arti kata sangat tergantung pada cara penggunaannya.

Dengan merujuk pada pendapat Wittgenstein tentang penggunaan kata, Mustansyir (1988: 94) berpendapat bahwa arti sebuah kata sangat tergantung pada penggunaannya dalam suatu kalimat, sedangkan arti suatu kalimat sangat tergantung pada penggunaannya dalam bahasa. Sehubungan dengan hal itu yang menjadi masalah, sejauh mana penggunaan eufemisme dalam pers Indonesia? Khusus mengenai penggunaan eufemisme, yang menjadi masalah siapa yang sangat berperan dan untuk siapa ungkapan ditujukan? Bahasan untuk menjawab kedua pertanyaan ini, terbagi dua yaitu fungsi kata dan fungsi kalimat.

### 3.2 Fungsi Kalimat

Pengertian kalimat adalah bentuk gramatikal yang terdiri atas satu atau lebih klausa yang tertata menurut pola tertentu dan dapat berdiri sendiri sebagai satu satuan (Kridalaksana, 1983: 71). Satuan yang dimaksudkan adalah ungkapan atau pernyataan yang diakhiri dengan tanda baca titik (.). Tanda baca inilah yang membedakan

antara kalimat dan klausa. Sedangkan yang dimaksud klausa adalah dua kata atau lebih yang berkelompok dan membangun suatu pernyataan atau mengandung suatu pernyataan (Widyamartaya, 1990:12).

Fungsi kalimat yang dimaksudkan adalah penggunaan eufemisme dalam satu kesatuan ide yang terdiri dari satu atau dua paragraf. Artinya fungsi tersebut baru dapat diketahui apabila terdiri dari satu atau dua paragraf yang saling terkait. Bila dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, kalimat tersebut susah dikategorikan sebagai eufemisme. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh di bawah ini:

- (1) "Dalam beberapa tahun terakhir ini, sambung Alfian berapa negara di Amerika Latin nampak sedang bergerak ke arah peningkatan demokrasi. Hanya masih terlalu pagi untuk menyimpulkan bahwa sistem demokrasi mereka itu sudah mapan dan handal. Hal yang relatif sama dapat pula dikatakan terhadap Indonesia, Malesia dan Muangthai, yang masih proses membangun Demokrasi mereka menjadi sistem politik yang mantep. Malah sejumlah negara berkembang lain, seperti Pakistan, Banglades nampak belum menghasilkan format sistem politik demokrasi yang pas."

(*Harian Pelita*, Kamis, 3 Januari 1991, hal.7, kol.2)

Contoh di atas, terdiri atas satu paragraf dan empat kalimat. Kesemuanya dapat dianalisis berdasarkan makna kalimat inti dan kalimat pelengkap. Kalimat inti ada pada kalimat kedua, berbunyi "Hanya masih terlalu pagi untuk menyimpulkan bahwa sistem demokrasi mereka sudah mapan dan handal." Maksud dari kalimat ini menim-

bulkan kritik keras terhadap negara sedang berkembang yang sedang menyatakan dirinya demokrasi yang mapan.

Kritikan ini diarahkan kepada Indonesia. Karena di antara sekian negara sedang berkembang yang dicontohkan, ternyata hanya Indonesia yang selalu memproklamirkan diri sebagai negara yang paling aman di dunia. Untuk lebih memperhalus kritikan tersebut, maka Alfian membeberkan contoh negara-negara Amerika Latin dan sebahagian di Asia Tenggara dan Afrika. Seperti pada kalimat pertama disebutkan Amerika Latim; kalimat ketiga menyebutkan Malesia dan Muanthai dan pada kalimat keempat menyebutkan Pakistan dan Banglades.

Kritik ini dikategorikan sebagai ungkapan penghalusan karena bagi pembaca berita yang tidak cermat tidak dapat menangkap langsung maksudnya. Sebaliknya bagi pembaca yang sangat cerdas langsung menangkap maksudnya. Jika Alfian tidak mengungkapkan dengan halus mungkin saja pers tidak akan memuatnya. Bila pers memuatnya kemungkinan besar SIUP-nya dicabut oleh pihak pemerintah karena dianggap dapat meresahkan masyarakat.

Bagi Alfian sebagai seorang cendekiawan, yang penting adalah idenya dapat diterima dengan baik yang mengarah kepada perbaikan struktur politik masyarakat. Selama ini jika ada yang mengeritik tentang hal tersebut selalu saja dianggap pihak ketiga, tersirat makna PKI. Dan memang kritikan semacam ini sangat efektif bagi

orang yang tidak senang dikritik secara langsung. Dan pada umumnya orang semacam ini adalah yang masih sangat feodal\*).

- (2) "Hanya saja, katanya lagi, untuk penelitian SDSB ini yang diwawancarai oleh petugas BPS (Biro Pusat Statistik) adalah mereka yang berkaitan dengan SDSB. Misalnya bandar, distributor dan agen. Tetapi Sudomo mengatakan yang paling tahu siapa pembeli kupon SDSB adalah para agen. Agen juga mengetahui kenapa orang membelinya."

(*Harian Pajar*, 13 Desember 1991, hal.1, kol.6)

Contoh (2) terdiri atas dua paragraf dan empat kalimat. Kalimat inti adalah kalimat pertama pada paragraf pertama, yaitu "Hanya saja, katanya lagi, untuk penelitian SDSB ini yang diwawancarai oleh petugas BPS adalah mereka yang berkaitan dengan SDSB." Kalimat ini mengandung makna yang membutuhkan penafsiran yang lebih jauh. Karena tentu saja, bila mengadakan penelitian harus dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan dengan masalah yang diteliti: Jadi yang akan dihubungi oleh BPS adalah yang berkaitan SDSB itu sendiri.

\*) Istilah feodal adalah berbeda dengan yang dimaksudkan di Eropa, Amerika karena yang dimaksudkan di atas adalah penguasaan secara otonomi di kalangan bangsawan. Dari kalangan ini, kebanyakan terjadi di lingkungan kraton di Jawa dan di daerah lain yang dikuasai oleh raja-raja. Raja sering pula identik dengan kesatria atau menguasai 'senjata pusaka'. Raja juga adalah menguasai persenjataan. Jadi, istilah feodal adalah penguasa (Setiawan, B. 1989: 278).

Selanjutnya Sudomo menyambungkan bahwa yang harus dihubungi seperti Agen dan Bandar pada kalimat kedua, paragraf pertama. Sedangkan paragraf kedua, kalimat pertama dan kedua adalah setara dan hanya merupakan penegas dari paragraf sebelumnya. Jelas sekali bahwa BPS sebelum terjun ke lapangan untuk mengadakan penelitian sudah ada nada mengancam dengan makna "Awas! Jika petugas macam-macam selama penelitian."

Ungkapan ini tidak diucapkan karena dianggap sangat terang-terangan menolak untuk meninjau kembali kebijaksanaan tentang SDSB. Sedangkan Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang menghargai setiap pendapat dan hak rakyat sebagai warga negara. Karena banyaknya aksi protes tentang hal tersebut, maka pemerintah dengan secara halus menolak protes tersebut dengan mengalihkan kepada penelitian. Dengan maksud agar pemerintah menunda permasalahan tersebut. Dan jika sudah berlangsung agak lama, para pengunjung rasa melupakan hal tersebut.

Hal demikian itu dapat dibuktikan dengan kalimat pertama dan kedua paragraf kedua yang berbunyi "... paling tahu siapa pembeli kupon SDSB adalah agen. Agen pula yang paling mengetahui mengapa membeli." Artinya kalimat ini adalah yang perlu dihubungi oleh petugas BPS agen sajalah. Sudah jelas jika hanya agen yang dihubungi jawabannya akan mengarah kepada yang sudah diperkirakan agar peredaran SDSB tidak dihapus.

Para agenlah yang menyalurkan selama ini, berarti mereka mengambil keuntungan sebagai agen. Orang semacam itu, tidak mau tahu apa ini halal atau haram, yang penting menguntungkan.

Pembaca yang cermat, dapat menangkap makna yang dikandung ungkapan Sudomo di atas. Dengan demikian sebetulnya, jika memang pemerintah akan mengubah peraturan tersebut, mengapa mesti diadakan penelitian. Seharusnya yang dipanggil adalah para dealer atau agen-agen untuk menghadap dan diwawancarai, kalau memang yang ingin diketahui siapa pembeli dan mengapa mereka membeli SDSB.

- (3) "Mendikbud juga menyangga kalau sistem kredit semester dituding sebagai sistem yang meredam kegiatan kemahasiswaan. SKS dianggap mengekan kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa. "Ini juga kesimpulan yang amat naif," ujarnya. Karena manusia yang produktif dan kreatif akan tetap kreatif dalam situasi apa pun. Demikian pula, mereka yang pasif dan apatis akan tetap sama dalam kondisi apa pun. Jadi di dalam SKS pun mereka yang kreatif akan tetap kreatif. "Aktivisme jangan dikaitkan dengan SKS," kata Fuad Hasan."

(*Harian Pelita*, 8 Januari 1991, hal.5, kol.1 dan 2).

Contoh (3) juga terdiri atas dua paragraf dan tujuh kalimat. Kalimat inti yaitu kalimat ketujuh yaitu "Aktivisme jangan dikaitkan dengan SKS." Dari ungkapan ini tersirat makna bahwa aktivisme di kalangan mahasiswa bukan disebabkan SKS, tetapi ada masalah lain yang menyebabkannya. Berbicara dengan aktifis memang



bukan hanya sistem pendidikan yang berpengaruh. Akan tetapi termasuk kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

Fuad Hasan juga mengungkapkan bahwa produktif dan kreatif tidak ada pengaruhnya terhadap situasi apa pun. Pernyataan ini jelas mengandung makna terbalik dari yang umum. Jika pernyataan ini benar maka kecerdasan atau kualitas pendidikan tetap sama dengan dahulu. Artinya tidak ada istilah tidak kreatif dan kreatif jika diukur dari aktivitas mahasiswa, maka kreativitas dapat dilihat pada kemampuan mengatasi setiap masalah yang dihadapi.

Keterkaitan antara kreatif dan aktivisme jelas. Artinya, bila kreativitas dibatasi jelas akan muncul berbagai macam akibat dan kenyataannya seperti itu terjadi di Indonesia. Kebebasan ilmiah tidak lagi menjadi Motto Perguruan Tinggi.

Fuad sebetulnya hanya berdalih agar semua pihak menyadari bahwa berbicara tentang pendidikan jangan seenak menuduh. Jika instansi lain tidak mampu membantu dalam menangani tentang pendidikan, tidak usah mengeritik. Dari ungkapan ini, tersirat makna bahwa terasa ada masalah dalam pelaksanaan SKS yang diberlakukan di Perguruan Tinggi dewasa ini. Buktinya bahwa beliau berdalih karena membuat pernyataan universal, seperti kalimat pertama dan kalimat kedua pada paragraf kedua.

Jika pernyataan umum tersebut dibenarkan, tersirat pula makna bahwa pendidikan tidak terlalu diharap untuk membentuk manusia kreatif dan aktif. Tanpa SKS, manusia akan tetap kreatif dan produktif begitu pula sebaliknya. Jadi SKS tidak ada pengaruhnya terhadap kreativitas dan aktivisme. Beliau menegaskan tidak perlunya menghubungkan SKS dengan aktivisme. Contoh lain dapat dilihat di bawah ini :

- (4) "Menurut Fuad, satu-satunya negara yang secara resmi melakukan protes terhadap insiden Dili 12 November 1991 lalu dengan membekukan bantuannya hanya Kanada. Sementara itu, protes di Australia hanya dilakukan oleh sekelompok masyarakat. "Saya sendiri sebenarnya tidak habis pikir mengapa hanya Kanada yang melakukan protes resmi. Padahal langka Kanada itu merugikan Kanada sendiri," tambahnya."

(*Harian Fajar*, 19 Desember 1991, hal.12, kol.5)

Paragraf di atas, terdiri atas empat kalimat, masing-masing saling melengkapi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya agar menjadi satu kesatuan ide.

Kalimat (1) adalah kalimat yang sifatnya memuat fakta tentang sikap Kanada tentang peristiwa Dili 12 Nopember 1991. Kalimat (2) juga kalimat yang sifatnya memuat fakta yang bertentangan dengan sikap "Kanada" yaitu sikap Australia tentang peristiwa tersebut. Kalimat (1-2) adalah merupakan argumentasi untuk mendukung kalimat (3). Kasus kalimat (3) menunjukkan

sikap pribadi Fuad Hasan. Dan kalimat (4) adalah merupakan kalimat inti pada paragraf ini.

Dari kalimat terakhir tersirat makna bahwa Fuad Hasan sebetulnya kembali menyesalkan sikap Kanada. Dengan secara halus menyatakan "Padahal menurut saya langkah Kanada merugikan Kanada sendiri". Pernyataan ini mengandung makna yang menerangkan bahwa sebenarnya tidak merugikan Kanada. Buktinya, mengapa pemerintah Indonesia mempermasalahkannya. Namanya saja bantuan pasti dirugikan pihak pihak yang dibantu. Dalam hal ini yang dirugikan adalah Indonesia. Secara logika memang ada juga kerugian Kanada, tetapi jika dibandingkan dengan kerugian yang dialami Indonesia lebih besar.

- (5) "Nah baru sekarang, untuk pembangunan hukum-hukum pidana misalnya kita melihat ke Belanda. Padahal di sekitar kita, ekonomi arahnya tidak lagi ke Belanda melainkan ke Amerika Serikat, seperti tanpaknya pada bidang pendidikan dan ekonomi kita, sementara hukum yang dipakai berorientasi Belanda. "Ini bukan berarti jelek, tapi perlu penyesuaian," kata dosen FH-UI ini."

(Harian *Pelita*, Sabtu, 2 Pebruari 1991, hal.11, kol.8).

Contoh (5) terdiri dari satu paragraf dan tiga kalimat. Kalimat (1,2) adalah merupakan pernyataan yang menunjukkan fakta terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Merupakan gambaran masalah yang dihadapi dan perlu diambil jalan keluarnya. Kalimat (3) juga sifatnya pernyataan yang menunjukkan suatu sikap terhadap hukum

yang berlaku di Indonesia. Sikap inilah yang menjadi dasar untuk mengadakan perubahan yang harus dilaksanakan. Seperti bunyi kalimat (3) "Ini bukan berarti jelek, tapi perlu diadakan penyesuaian."

Kalimat inti adalah kalimat (3) yang mengandung penafsiran yang sangat halus tentang keadaan hukum-hukum yang berlaku. Tidak seluruhnya hukum tersebut tidak baik, tetapi perlu ada perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Di sinilah letak bukti bahwa dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengajukan kritik yang sangat halus. Beliau memperjelas dengan bunyi, "Padahal di sekitar kita ekonomi tidak lagi arahnya ke Belanda melainkan ke Amerika, seperti tampak pada bidang pendidikan dan ekonomi kita, sementara hukum yang dipakai berorientasi Belanda." Ungkapan ini adalah merupakan argumentasi untuk memperkuat pernyataan pada kalimat (3).

Kesimpulannya bahwa hukum di Indonesia tidak lagi tepat untuk dilaksanakan. Perlu ada perubahan yang mengarah kepada perbaikan. Kesimpulan ini sebetulnya sangat kasar dan tidak digunakan secara telanjang karena bisa berakibat justru tidak mengarah kepada perbaikan hukum, tetapi justru pengeritik dianggap hanya mencari-cari kesalahan pemerintah. Bahkan bisa berakibat pers yang memuatnya menjadi sasaran.

- (6) "Deregulasi dan debirokratisasi di bidang ekonomi yang menjadi pembangkitnya partisipasi masyarakat, dinilai Rahmat, juga memiliki berbagai ketimpangan. Isu kesenjangan sosial sangat menonjol tahun ini, antara lain yang diakibatkan oleh pelaksanaan deregulasi yang belum memihak kepada rakyat kecil. Ketimpangan yang menurutnya, perlu diantisipasi dengan membuat aturan yang lebih fair."

(*Harian Pelita*, 31 Desember 1991, hal.1, kol.6).

Paragraf ini terdiri tiga kalimat yang menunjukkan antara kalimat yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan menjadi satu kesatuan ide. Kalimat (1) adalah pernyataan yang dibuat Rahmat sebagai suatu masalah. Kalimat (2) adalah akibat dari masalah yaitu terjadinya *kesenjangan sosial* Dan kalimat (3) berorientasi kepada jalan ke luar yang harus diambil dengan bunyi bahwa "*Ketimpangan yang ada menurutnya, perlu diantisipasi dengan membuat aturan yang lebih fair.*"

Rahmat mengungkapkan hal ini dengan tujuan agar kebijaksanaan mengenai deregulasi dan debirokratisasi secepatnya ditinjau kembali, karena kebijaksanaan tersebut hanya menguntungkan kalangan atas saja. Jika tidak semakin tercipta kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, antara Desa dan Kota. Kesenjangan ini bisa berakibat fatal jika tidak secepatnya diadakan perubahan aturan. Kesimpulan kritikan tersebut adalah kebijakan mengenai deregulasi dan debirokratisasi bertentangan dengan keadilan sosial. Artinya, pemerataan tidak tercipta dengan kebijaksanaan tersebut.

Kritik yang dilontarkan oleh Rahmat membuktikan seharusnya ada usaha yang baik dalam rangka melaksanakan tugas suci sebagai amanat rakyat. Dalam hal ini, yang dimaksud oleh Rahmat adalah perlunya pertimbangan yang dalam bagi penentu kebijaksanaan di bidang ekonomi. Dengan halus beliau mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi agar memperkuat idenya dan tidak dianggap mengada-ada. Kebijakan ekonomi sudah saatnya diarahkan kepada pemerataan dengan kata 'fair'.

Keenam contoh yang telah dipaparkan di atas dapat dijadikan gambaran tentang fungsi *kalimat*. Hal serupa dalam contoh lain, yang dapat dilihat melalui media atau pers. Pengambilan sampel di atas tidak didasarkan pada pertimbangan kuantitatif, tetapi didasarkan pada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, yang menjadi dasar bukan banyaknya sampel, tetapi yang penting dalam analisis sudah dapat menjawab permasalahannya dengan sampel tersebut.

Kesimpulan dari keseluruhan uraian ini ada dua yaitu: eufemisme digunakan untuk menyampaikan kritik dan dipakai dalam bentuk apologi. Pertama dikatakan bersifat kritik karena dengan ungkapan-ungkapan yang sangat halus dapat dimengerti maksudnya oleh orang di kritik tanpa berakibat buruk. Bahkan lebih diutamakan agar pembaca yang cermatlah yang mampu menangkap maksud

kritikan tersebut. Bentuk kritik ini umumnya dilakukan para cendekiawan. Kedua, eufemisme yang bersifat apologi adalah ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh kalangan pejabat. Dari ungkapan-ungkapan tersebut dapat terlihat bahwa sebetulnya mereka berusaha menjawab permasalahan-permasalahan melalui pembelaan diri. Artinya, mereka berusaha berargumentasi dengan menggunakan kalimat-kalimat dengan sangat hati-hati. Hal itu dapat dilihat pada contoh (2,3 dan 4).

Uraian di atas dapat pula memberi gambaran bahwa dalam penggunaan eufemisme, untuk sementara ini, masih didominasi oleh para cendekiawan. Cendekiawan dalam artian luas. Jika cendekiawan ini digolongkan sebagai pejabat, maka penggunaan eufemisme terkait pada kemampuan pemilihan kalimat-kalimat serta kemampuan melontarkan gagasan.

### 3.3 Fungsi Kata

Setelah pembahasan mengenai fungsi kalimat dalam pembahasan (3.2), maka pembahasan selanjutnya diarahkan kepada fungsi kata. Yang menjadi masalah apa yang dimaksud dengan 'kata'? Bagaimana penggunaannya serta kapan digunakan?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, seperti pada pembahasan (3.1) tentang contoh penggunaan kata dan makna kata itu sendiri, pembahasan pada bagian ini

dirujuk pada batasan pengertian tentang kata. 'Kata' adalah morfen atau kombinasi morfen sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan yang mempunyai makna (Kridalaksana, 1983: 76). Adapun yang dimaksud makna kata, seperti contoh pada awal bab ini, sangat terikat pada struktur kalimatnya. Yang menentukan fungsi, kata pada struktur kalimat adalah penutur, yaitu sejauh mana kemampuan seseorang menggunakan pilihan kata yang tepat dalam mengungkapkan idenya. Dalam penggunaan fungsi kata ini dapat dilihat dari referensinya yang berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung kepada siapa yang menjadi penutur serta pada saat dan tempat dituturkannya kata itu (Purwo, 1984: 1).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh-contoh di bawah ini:

- (7) "Drama *penertiban* penjual liar berlangsung tertib selama sejam. Hasilnya seluruh penjual liar yang jumlah banyak bercokol di luar pasar sentral, kini bersih."  
(*Harian Fajar*, 5 April 1991)

Jika kata *penertiban* berdiri sendiri, maka ia bermakna *pengaturan*. Untuk lebih memperhalus istilah *penggusuran* tidak digunakan karena ada kesan negatif atau pengusiran. Jika ditafsirkan lebih jauh bahwa dalam ungkapan ini penutur atau penulis berita mampu menggunakan pilihan kata dengan tepat berdasarkan kepentingan penuturnya.



Biasanya yang melakukan penggusuran adalah *penguasa*. Kasus penggusuran biasanya dilakukan oleh aparat pemerintah, dan jika aparat pemerintah yang melakukan penggusuran secara sewenang-wenang, bisa dianggap penjajah. Itulah sebabnya penutur dengan hati-hati mengeluarkan suatu ungkapan yang arahnya kepada sikap kesewenang-wenangan. Jadi dengan bahasa dapat melindungi "kejahatan" yang dibuat oleh aparat pemerintah.

- (8) "... Sebab AST ... tersangka pelakunya sendiri telah dalam *pengamanan* pihak berwajib."  
(*Harian Fajar*, tanggal 30 November 1991).

Kata *pengamanan* pada contoh (8) bermakna *penangkapan* atau *sementara dalam tahanan*. Kata *pengamanan* sudah mengalami proses afiksasi yaitu awalan *peng-* dan akhiran *-an* dari kata dasar *aman*. Makna kata *aman* dalam kamus adalah sesuatu yang terjaga dari gangguan atau identik dengan makna kata 'merdeka'.

Ungkapan di atas mengandung kesan lebih baik jika dikatakan *pengamanan*, walaupun kenyataannya *sementara dalam tahanan*. Pembaca sebetulnya mengetahui bahwa Ast sedang dalam tahanan.

- (9) "Mulai April 1989, misalnya mari mengubah sebutan kantor inspeksi pajak (KIP) yang akan menjadi kantor pelayanan pajak (KPP) lebih sesuai fungsinya."  
(*Editor*, no.35/th II/ 29 April 1989, hal.12).  
Kata *pelayanan* pada contoh (9) bermakna *inspeksi*.

Kata *pelayanan* pada contoh (9) bermakna *inspeksi*. Apa pun namanya tetap inspeksi pajak. Memang lebih halus rasanya jika menggunakan kata *pelayanan* jika dibandingkan dengan kata *inspeksi*. Ungkapan ini dimaksudkan agar para pembayar pajak datang dengan sukarela kepada kantor untuk membayar pajaknya.

- (10) "Sudah perlu diangkat ke permukaan sehingga orang-orang menyadari bahwa perbuatan merugikan masyarakat. Apalagi *komersialisasi* jabatan sudah membudaya dalam lembaga-lembaga negara kita...."  
(*Harian Fajar*, Kamis, 22 November 1990).

Istilah *komersialisasi* pada contoh (10) bermakna *menyalahgunakan* atau *korupsi*. Tapi dalam arti kamus adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris *comercil* artinya keuntungan yang sering digunakan dalam istilah dalam bisnis. Istilah ini digunakan supaya pembaca terkesan bahwa pejabat yang melakukan hal yang demikian tetap baik.

Makna kata tersebut di atas, sangat terkait dengan strukturnya. *Komersialisasi* diikuti kata *Jabatan* baru bermakna *korupsi*. Jadi jelas bahwa penggunaan kata itu menunjukkan fungsi kata dalam pemanfaatan penghalusan.

- (11) "Mungkin yang memusingkan lagi adalah berdatangannya wanita-wanita *penghibur* yang menjadi kawasan Batam adalah operasi empuk ...."  
(*Suara Pembaruan*, Sabtu, 5 Oktober 1991).

Kata *penghibur* pada contoh (11) bermakna *wanita siap melayani hubungan seks di luar ikatan pernikahan*.

Jika digunakan, kata ini sangat kasar, bahkan lebih mendekati tabu. Jika sampai pada tingkat tabu berarti terkait dengan keyakinan. Sejelek-jelek sifat wanita, masih tetap menggunakan ungkapan yang lebih halus. Keterkaitan antara sifat dasar wanita memiliki sifat dasar yang halus.

- (12) "Kegagalan hanya merupakan *keberhasilan* yang tertunda. Semoga PSM ...."  
(*Harian Fajar*, Rabu, 6 November 1991).

Kata *keberhasilan* pada contoh (12) bermakna *cita-cita kemenangan yang didambakan dan belum tercapai*. Kata tersebut jika berdiri sendiri bersinonim dengan *kesuksesan*.

Dalam penggunaan kata tersebut sangat terkait dengan kata sebelumnya, yaitu kata *kegagalan* yang berlawanan maksudnya. Jadi penghalusan ini lebih menitikberatkan pada motivasi bagi PSM dalam menghadapi kekalahannya.

Ungkapan di atas lebih bersifat membenaran diri atau apologi. Orang yang menghadapi kekalahan cenderung berusaha menghibur diri dengan menggunakan ungkapan yang lebih halus. Agar dalam perjuangan selanjutnya masih ada gairah. Kesimpulannya bahwa penggunaan penghalusan dalam konteks seperti contoh (12) mengandung koreksi diri dalam menghadapi perjuangan selanjutnya.

### 3.4 Kesimpulan

Dari uraian pada bab ini, dapat disimpulkan bahwa kedua fungsi yaitu fungsi kata dan kalimat dalam penggunaan ungkapan-ungkapan penghalusan sebagai berikut:

- 3.4.1 Fungsi kalimat dalam penggunaan eufemisme sangat terikat pada makna kalimat. Struktur gramatikal ikut menentukan makna tersebut. Oleh karena itu, penggunaan penghalusan dengan bentuk ini adalah tergantung dari siapa dan kepada siapa ungkapan tersebut ditujukan.
- 3.4.2 Dalam kaitannya dengan eufemisme ternyata terdapat dua bentuk penggunaan kalimat yaitu bentuk kritik dan apologi. Untuk lebih jelasnya, bahasan tentang kedua bentuk ini dapat dilihat pada bab 4.
- 3.4.3 Fungsi kata dalam penggunaan eufemisme sangat terkait pada makna kata dan perubahan makna itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan makna kata di bawah ini:

- |      |                |   |                                    |
|------|----------------|---|------------------------------------|
| (7)  | penertiban     | = | Pengusuran                         |
| (8)  | Pengamanan     | = | penangkapan<br>(sementara ditahan) |
| (9)  | pelayanan      | = | inspeksi                           |
| (10) | komersialisasi | = | korupsi                            |

- (11) penghibur = siap melayani hubungan seks di luar pernikahan
- (12) Keberhasilan = suatu cita-cita yang belum tercapai

3.4.4 Fungsi kata sangat terkait pada kemampuan penulis berita atau penutur dalam penggunaan kata. Jika penutur tidak cermat menggunakan kata seperti contoh (7-12) bisa terjadi akibat lain dari apa diinginkan oleh penutur tersebut. Selain itu, penulis harus mampu memahami siapa pembacanya atau kepada siapa gagasan tersebut.

3.4.5 Penggunaan kata dalam bentuk penghalusan yaitu apology, tabu, retorik dan penghormatan. Penjelasan yang lebih rinci tentang hal ini dapat dilihat pada bab selanjutnya.

## BAB IV

### BENTUK-BENTUK EUFEMISME

#### 4.1 Pendahuluan

Pembahasan mengenai bentuk-bentuk eufemisme pada bab ini sangat erat kaitannya dengan bab tiga. Hal ini bertitik tolak dari uraian tentang penggunaan ungkapan eufemistis pada kedua bab tersebut. Keterkaitan antara kedua bab ini yaitu dari aspek analisis yang digunakan sama. Berdasarkan analisis fungsi kata dan fungsi kalimat ditemukan berbagai kategori dalam penggunaan ungkapan eufemistis. Dari pembagian kategori inilah yang mendasari bentuk-bentuk ungkapan eufemistis pada pembahasan ini.

Data menunjukkan bahwa penggunaan ungkapan eufemistis terdiri atas berbagai kategori. Untuk menentukan kategori dapat dilihat dari pembahasan yang menggunakan pendekatan makna. Dari sinilah digambarkan bahwa makna gramatikal dan makna leksikal sangat berperan dalam penggunaan ungkapan pelembut. Bahkan makna kata dan makna kalimat sangat ditentukan oleh konteksnya.

Dari pembahasan tentang fungsi kalimat dan fungsi kata, ditemukan adanya pembagian kategori sebagai berikut (1) kritikan, (2) apologi, (3) retorika, (4) tabu dan (5) penghormatan. Dalam uraian selanjutnya, masing-masing kategori disajikan melalui

tiga sampel. Pengambilan tiga sampel dalam penelitian ini bersifat kualitatif bukan banyaknya sampel yang menentukan validitas atau tidaknya suatu penelitian. Tetapi yang menjadi masalah adalah sejauh mana sampel ini dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian berikutnya:

#### 4.2 Kritikan

Pengertian kritikan di sini sama dengan pengertian dalam bahasa Inggris 'criticism' berarti kecaman (Echol & Shadily, 1987: 155). Maksudnya, kecaman yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang sementara terjadi atau telah terjadi pada sebuah peristiwa. Untuk memperjelas apa yang dimaksudkan dengan kritik dapat dilihat pada contoh-contoh sebagai berikut:

- (13) "Muktamar Muhammadiyah bulan ini dan Mukernas Partai Persatuan Pembangunan bulan sama akan memberi perhatian pakir miskin. Semoga tidak terbatas memberi perhatian saja."

(*Harian Pelita*, 13 Desember 1991, hal.4).

- (14) "Kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini menampakkan *mamfaat* dan *keberhasilan*, tetapi di sisi lain masih ada yang menganggap pembangunan seharusnya memperhatikan kelayakan teknologi dan sosial sehingga masalah dampak negatif pembangunan dapat dikurangi." ungkap Prof.Dr.Ir. Soejani, kepala PPSML-UI."

(*Harian Pelita*, Kamis, 13 Desember 1990, hal.5).

(15) "Kehadiran RCTI sebagai salah satu media informasi memang suatu hal yang *menggembirakan*. Namun bagi kami selaku pembina Majelis Ta'lim, anak-anak merasakan suatu yang tidak wajar terjadi pada diri anak-anak sejak adanya RCTI."

(*Harian Pelita*, Jum'at, 16 November 1990, hal.4).

Contoh di atas memberi gambaran kepada pembaca bahwa penggunaan kalimat pada contoh (13) *Semoga tidak terbatas memberi perhatian saja* bermakna kritikan yang ditujukan kepada Muhammadiyah dan Partai Persatuan Pembangunan. Contoh ini mengisaratkan bahwa kemiskinan tidak sekedar dibicarakan, tetapi harus disertai tindakan yang nyata.

Kritikan ini adalah merupakan koreksi terhadap Muhammadiyah dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai organisasi masyarakat dan sebagai Organisasi Partai Politik terbesar di Indonesia. Kedua lembaga ini sangat diharapkan perannya. Ungkapan ini mengandung unsur penghalusan karena menggunakan kata 'semoga' yang mengandung makna sebuah harapan. Melalui ungkapan ini, terbersit suatu keinginan agar kedua organisasi tersebut mengevaluasi diri, sejauh mana peranannya dalam pengembangan masyarakat miskin selama ini.

Ungkapan pelembut yang mengandung kritikan dapat pula ditemukan pada Contoh (14) melalui penggunaan ungkapan yang bermakna terbalik. Penggunaan kata '*keberhasilan*, yang diikuti dengan kata sambung '*tetapi*' tidak bermakna persis sama dengan makna



'sukses dalam cita-cita', bahkan bermakna 'kegagalan' dalam artian pembangunan di Indonesia.

Dari ungkapan ini dapat dilihat bahwa pengeritik tidak sekedar menyampaikan keritikannya, tetapi dengan jelas menginginkan adanya perubahan yang terjadi. Pengeritik menegaskan bahwa kegagalan pembangunan dewasa ini disebabkan karena pemerintah tidak terlalu memperhatikan '*studi kelayakan*' dalam perencanaan proyek. Akibatnya pelaksanaan proyek tidak memperhitungkan dampak negatifnya.

Makna lain juga tersirat pada *lemahnya Perencanaan* yang kemungkinan memunculkan dampak yang ditimbulkan oleh proyek-proyek yang direncanakan. Dengan halus Prof. M. Soejana mengharapkan bahwa pemerintah harus melakukan studi terlebih dahulu dalam merencanakan proyek. Ungkapan penghalusan ini jelas menunjukkan adanya keinginan suci agar kesalahan yang telah lalu dapat dijadikan pelajaran agar pembangunan dapat berjalan dengan baik disertai hasil yang juga baik. Untuk menunjukkan bukti adanya kesalahan yang diperbuat, pengeritik menggunakan klausa '*..mengurangi dampak negatif...*' Artinya, dampak negatif pembangunan selama ini, cukup besar.

Begitu pula pada contoh (15) yang menggunakan kata '*menggembirakan*' dan diikuti kata '*namun*'. Pada ungkapan di atas, kata menggembirakan mengandung makna terbalik yaitu '*mengecewakan*'. Kata '*namun*' digunakan

dalam menyambung ungkapan yang mengandung makna 'protes' atas kehadiran RCTI.

Unsur-unsur yang menjadi dasar dalam kritikan ini adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh kehadiran RCTI. Untuk menilai dampak tersebut, pengeritik menggunakan tolak ukur sebagai pembina Majlis taklim. penggunaan klausa '*..tidak wajar terjadi pada diri anak-anak ...*' dipakai untuk menyampaikan hal yang merusak kepribadian anak-anak.

Kritikan ini mengandung makna agar RCTI dalam menayangkan program-programnya harus memperhatikan nilai-nilai atau misi yang akan ditanamkan kepada penontonnya dengan jelas. Sebagai negara yang penganut agama, rencana penayangan harus mempertimbangkan nilai agama.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa ungkapan eufemistis sering digunakan oleh cendekiawan dan wartawan dalam menyampaikan kritikan yang ditujukan kepada penentu kebijakan tentang kesalahan atau kekurangan, baik telah terjadi maupun yang sementara terjadi. Tujuan kritikan semacam ini yang menjadi misi adalah terjadinya perbaikan terhadap kekurangan yang dilakukan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Dengan ungkapan yang sangat halus diharapkan perubahan dapat terlaksana dengan baik dan sejalan dengan tujuannya yang baik pula.

Pengertian apologi adalah sebuah pengakuan terhadap kesalahan atau kekurangan ajaran telah terjadi dan diiringi oleh ekspresi penyesalan (Bautista, 1978:89). Sebuah peristiwa yang disesalkan lalu dialihkan kepada masalah lain yang berkaitan dengan peristiwa yang dimaksudkan. Untuk menghindari bahwa sebetulnya peristiwa yang dimaksudkan bukan hanya disebabkan satu masalah saja, tetapi ada penyebab lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh sebagai berikut:

- (16) "... Terus terang saja, tidak sedikit dari mereka itu anak-anak pejabat yang *dititipkan* Biasa, titipan dengan surat sakti, ujar Kamardy, Dirut BRI."

(Mingguan *Tempo*, Tanggal 12 Oktober 1991, hal.40).

- (17) "Sudah keterlaluhan, 'Mereka terlalu memihak kepada tuan rumah. Masak ada pemain persema yang *hands ball dikotak penalti*. Inikan keterlaluhan. Pada hal, kami telah berjuang maksimal untuk menyamakan kedudukan tambahannya."

(Harian *Fajar*, 1 November 1991, hal.11)

- (18) "ABRI muncul tidak hanya sekedar karena Dwi Fungsi. Tapi *karena Sikon* membutuhkan pimpinan yang tegas, punya pola pikir sistematis dan menguasai manajerial. Kemampuan ada pada seorang perwira, karena dia tidak dididik hanya sebagai komandan, tetapi juga dididik sebagai manajer, menjadi Bapak, menjadi pemimpin dan mejadi guru. Kalau sipil punya kader-kader yang baik, posisi akan berangsur-angsur dilepas. Bukankah sekarang ini sudah banyak yang Bupati Sipil?"

(Mingguan *Tempo*, 12 Oktober 1991, hal.29).

Penggunaan bentuk apology dalam contoh (16) melalui klausa *anak pejabat yang dititipkan* dengan makna *anak pejabat yang terpaksa diterima*. Kamardy menyesalkan atas adanya peristiwa atau perilaku pejabat yang cenderung memaksakan agar anaknya diterima menjadi karyawan BRI, karena anak pejabat yang dimaksudkan tidak produktif dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya terjadi pembengkakan karyawan dan akhirnya BRI menanggung beban kerugian.

Ungkapan Kamardy mengandung unsur yang halus melalui penggunaan kata '*dititipkan*'. Makna kata ini dianggap sebagai ungkapan yang mewakili penyesalan atas adanya tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan BRI. Dari ungkapan ini, tersirat makna bahwa sebenarnya kesalahan yang terjadi tidak hanya dari kalangan dia, tetapi akibat ulah pejabat. Dengan kata lain Kamardy berusaha membela diri terhadap adanya tindakan PHK besar-besaran di lingkungan BRI.

Penggunaan ungkapan semacam tersebut di atas dapat dilihat pada contoh (17) melalui penggunaan klausa *..hands ball dikotak penalti tidak ditiup*, yang bermakna penyesalan atas *ketidakadilan wasit*. Penyesalan ini terjadi karena tim PSM kalah dalam pertandingan melawan Persema. Dengan kekalahan tersebut, ada salah seorang anggota tim PSM menegaskan bahwa kekalahan tersebut disebabkan oleh wasit yang tidak adil.

Ungkapan tersebut mengandung unsur penghalusan karena dalam pertandingan mereka telah berusaha keras dan tetap kalah. Kekalahan itu kemudian dikaitkan pada tindakan wasit. Oleh karena itu, untuk membangkitkan semangat para anggota timnya dan pendukungnya, tim PSM tetap membela diri. Dengan pembelaan diri setiap simpatisannya tetap mempercayai PSM dalam menghadapi pertandingan berikutnya.

Bahan bandingan lain dalam penggunaan bentuk apology dapat dilihat pada contoh (18) melalui penggunaan frase *karena sikon artinya bukan kesalahan pemerintah sekarang*. Ungkapan semacam ini adalah salah satu bentuk pembelaan diri pemerintah sekarang karena adanya kritikan mengenai terlalu banyaknya ABRI yang menduduki jabatan sipil. Hal ini dianggap bahwa pemerintahan dikuasai oleh ABRI atau kepemimpinan di Indonesia adalah kepemimpinan ABRI. Jadi, dengan sikap penyesalam pemerintah dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut, terpaksa dilakukan karena tidak ada alternatif lain.

Pihak sipil dianggapnya belum mampu menyaingi kemampuan ABRI. Hal itu dapat dilihat melalui penggunaan klausa *'kalau sipil punya kader-kader yang baik'*. Artinya pihak sipil belum mampu seperti yang dilakukan ABRI.



Penggunaan ungkapan penghalusan di sini dapat menjadi alasan untuk menyatakan bahwa bukan kesalahan pemerintah. Tersirat makna pembelaan diri agar mereka dianggap tetap adil dan demokratis dalam menjalankan kebijaksanaan mengenai pengangkatan Bupati.

Kesimpulan dari penggunaan ungkapan eufemistik yang berbentuk apologi, pada umumnya digunakan oleh orang-orang yang besar tanggung jawabnya terhadap masyarakat, tetapi mereka melakukan kesalahan. Tujuan penggunaan ungkapan semacam ini adalah untuk menyatakan sikap pembelaan diri dari kesalahan yang telah atau sementara terlaksana. Usaha pembelaan diri ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan orang lain kepada dirinya dengan cara menyatakan sikap penyesalan atas peristiwa yang dilakukan dan mengalihkan kesalahan tersebut kepada orang lain.

#### 4.4 Retorika

Pengertian retorika adalah seni atau cabang pengetahuan yang mana membahayakan aturan atau prinsip-prinsip mendasar terhadap semua komposisi efektif, apakah itu prosa atau syair (Pei, 1971: 823). Maksudnya, retorika adalah penggunaan bentuk atau gaya dalam berbahasa oral dengan kepandalan berbicara. Retorika sering dinilai sebagai penggunaan bahasa yang baik, tetapi tak berarti. Penggunaan bentuk retorika

semacam ini dari bahasa lisan yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan dan dimuat oleh pers.

Retorika yang dimaksud pada penjelasan ini sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan masyarakat yang menjadi objek ide tersebut. Tujuan dari ungkapan yang berbentuk retorik agar penerima ide dapat menerimanya dengan rasa terpikat, tanpa menyadari bahwa ia telah terpengaruh terhadap ide tersebut. Atau tidak ia merasa terpaksa menerimanya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh-contoh sebagai berikut:

- (19) "Azwar lantas mengambil contoh, Garuda ketika di bawah pimpinan Wiweko Supomo dan R.A.J. Lumenta. Pada masa kepemimpinan mereka, Garuda Indonesia menghadapi masa-masa sulit, kata Azwar, *namun mereka* telah berhasil meletakkan dasar yang kuat bagi pengembangan BUMN tersebut ke arah yang lebih maju."

(*Harian Fajar*, Sabtu 18 Januari 1992, hal.1, kol. 3 & 4).

- (20) "Dalam surat anda telah anda sebutkan bahwa anda pernah mengalami tabrakan lalu geger otak. Menurutnya, ada kaitan antara tabrakan dengan penyakit anda sekarang. Tabrakan atau geger otak itu merupakan peristiwa yang *cukup mendalam* serta *berkesan* bagi diri anda walaupun hal ini anda tak pernah anda sadari secara penuh."

(*Harian Pelita*, Minggu, 22 Desember 1991, hal.6, kol.7).

- (21) "Di sisi lain harus pula diakui bahwa ada ayat Al Qur'an yang abadikan ucapan Selamat Natal yang pernah diucapkan Nabi Isa, tidak terlarang membacanya, tidak keliru pula mengucapkannya selamat kepada siapa saja *dengan catatan* memahami dan menghayati maksud menurut Al Qur'an demi kemurnian aqida, ungkap, Qurasy Syihab."

(*Harian Pelita*, Kamis, 22 Desember 1991, hal.1)

Bahasan tentang bentuk retorika pada contoh 19, 20, 21 serta implikasinya dapat dilihat sebagai berikut: Contoh (19) yang menggunakan frase "..., namun mereka ..." merupakan ungkapan penghalusan yang ditujukan khusus kepada orang-orang yang telah berjasa kepada Garuda. Akan tetapi, pada ungkapan ini tersirat makna bahwa orang yang dimaksudkan adalah orang yang sementara dalam keadaan berduka karena sementara dicopot jabatannya.

Ungkapan ini bertujuan untuk menghibur atau membangkitkan semangat dan sekaligus harapan serta rasa simpati terhadap pimpinan Garuda dan termasuk kepada Azwar Anas sendiri. Fungsi retorika di sini adalah agar mantan pejabat Garuda tetap merasa besar andilnya terhadap pengembangan BUMN ini walaupun mereka tidak lagi menjabat sebagai pimpinan.

Contoh lain (20) menerangkan tentang seorang pasien yang berkonsultasi kepada dokter yang khusus bertugas pada Harian Pelita. Pasien tersebut bertanya tentang penyakit yang dia derita. Ternyata sang dokter menjawab dengan penggunaan kata yang sangat bersayap. Dapat dilihat pada kalimat, "*Tabrakan dan geger otak itu merupakan peristiwa yang cukup mendalam serta mengesankan bagi diri anda walaupun hal ini anda tak pernah anda sadari secara penuh.*"

Penggunaan kata mendalam serta berkesan dan keterkaitannya dengan geger otak dan tabrakan, jelas



menunjukkan bahwa orang yang tabrakan dan mengalami geger otak sangat membahayakan. Begitu pula adanya peristiwa tabrakan yang mengakibatkan geger otak yang mengancam jiwanya. Penggunaan kata berkesan hanya bersifat retorik.

Ungkapan eufemistis pada contoh di atas dapat bersifat retorik karena menggunakan kata yang mampu mengikat secara batiniah sang pasien. Sang dokter menggunakan kata-kata tertentu agar pasien tersebut tetap memiliki gairah hidup. Jika sang dokter tidak menggunakan kata-kata tertentu bisa berakibat fatal dan bahkan pasien tersebut tidak akan memiliki gairah hidup yang diperlukan dalam proses penyembuhan.

Bentuk ini dapat dibandingkan dengan penggunaan bentuk eufemistis pada contoh (21). Dengan menggunakan sebuah pernyataan yang bermakna bahwa ucapan Selamat Natal tidak dibolehkan, kecuali bagi orang-orang yang memahami isi Al Qur'an dengan baik. Ungkapan ini digunakan agar dalam mengucapkan Selamat Natal tidak sembarang orang. Oleh karena itu, dikeluarkanlah fatwa tentang hal tersebut dengan halus. Untuk membuktikan fatwa ini halus dapat dilihat dengan penggunaan frase dengan catatan yang bermakna dengan syarat.

Ungkapan ini mengandung unsur eufemisme karena adanya kemampuan menggunakan pemilihan kata dalam mengungkapkan gagasan. Dari dari gagasan tersebut terkandung unsur pertimbangan dalam mengucapkan

selamat natal. Pembaca yang cermat dapat menangkap pesan bahwa dalam berhubungan antara sesama umat beragama harus hati-hati agar unsur akidah tidak dikorbankan. Ungkapan ini juga mengandung unsur perintah agar mempelajari isi Al Qur'an dengan baik, khususnya mengenai ucapan selamat kepada Nabi Isa As.

Kesimpulannya, penggunaan ungkapan eufemistis dalam bentuk retorik pada umumnya digunakan bagi orang-orang yang melontarkan ide dengan tujuan agar tidak sadar penerima ide tersebut menjalankannya, baik perintah ataupun larangan. Tujuan ungkapan semacam ini adalah untuk menyediakan jalan ke luar bagi orang-orang yang sementara menghadapi masalah. Secara tidak sadar, penerima ide tersebut dapat membangkitkan semangat baru yang dalam hal tertentu tersirat makna yang lain, yaitu pemaksaan kehendak.

#### 4.5 T a b u

Tabu adalah larangan menggunakan kata-kata tertentu karena takut atau demi sopan santun (Kridalaksana, 1983: 161). Pengertian ini menjadi dasar dalam penyajian bentuk tabu. Pengembangan kategori ini searah dengan apa yang diungkapkan oleh Frankin dan Rodman (1978: 275) yang berpendapat bahwa pengungkapan kata-kata tabu sering dikaitkan dengan jenis kelamin dan fungsinya. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seksual atau "sexual

intercourse" dinyatakan melalui kata-kata pengganti yang mendekati maksud dan dipahami oleh masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh di bawah ini:

(22) "As, 26, salah seorang mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di daerah ini, kepergok melakukan *hubungan badan* dengan istri salah seorang tetangga rumahnya ...."

(Harian Fajar, Rabu, 6 November 1991, hal.2).

(23) ".... Tak kecuali dengan seronok yang mewajibkan *buka-bukaan*, memamerkan "*sekwilda*" (*sekitar wilayah dada*) dan "*Bupati*" (*Buka paha tinggi-tinggi*) bahkan kalau perlu lebih dari itu."

(Harian Fajar, Minggu, 9 Januari 1991, hal.6, kol.7).

(24) ".... Sebelumnya Lukman dua kali *menggaulinya*."

(Mingguan Tempo, 12 Oktober 1991, hal.92).

Contoh 21,23, dan 24 membuktikan adanya penggunaan ungkapan eufemistis pada bentuk tabu. Penggunaan ini membuktikan bahwa ungkapan penghalus sangat erat kaitannya dengan kepercayaan atau dengan hal-hal yang bersifat 'amoral'. Bentuk seperti ini pada umumnya menggunakan ungkapan-ungkapan yang dekat dengan pengertian tentang organ seks dan fungsinya. Seperti penggunaan frase *hubungan badan* yang bermakna *bersetubuh*; penggunaan *sekwilda* (*sekitar wilayah dada*) yang bermakna *daerah payudara* dan *bupati* (*buka paha tinggi-tinggi*) yang maknanya alat *kelamin wanita* serta penggunaan kata *menggaulinya* yang bermakna *bersetubuh*.

Kesimpulannya adalah, penggunaan bentuk ini, terasa lebih halus jika dibandingkan dengan kata-kata yang langsung. Melalui ungkapan ini, dapat dimengerti maksudnya oleh pembaca berdasarkan strukturnya. Hal ini sangat berkaitan dengan tradisi masyarakat di Indonesia. Penggunaan istilah langsung akan menimbulkan kesan bagi pembaca bahwa penutur atau penulis berita melanggar adat atau kebiasaan masyarakat.

#### 4.6 Penghormatan

Kata penghormatan berasal dari kata 'hormat' yang telah mengalami proses afiksasi atau awalan *peng-* dan akhiran *-an* yang bermakna *penghargaan*. Kata ini lebih dekat dengan makna perilaku yang dapat berubah sifatnya menjadi pemujaan (Poerwadarminta, 1976: 361). Pengertian ini sangat terikat pada etika dalam berinteraksi melalui ungkapan-ungkapan yang ditentukan oleh penutur. Etika sangat terikat dengan budaya yang berlaku, baik pada hubungan antar personal maupun pada hubungan antar lembaga.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh sebagai berikut:

- (25) ".... Oleh karena itu, Hari Soegiman menegaskan, jika iklan itu dimaksudkan kampanye jelas tidak boleh, 'karena belum saatnya.' Ia juga mengatakan bahwa Depdagri akan minta *penjelasan* dari DPP-PDI (Harian *Pelita*, Sabtu, 1 Desember 1990, hal.1, kol.9).

- (26) "Presiden Bush mempertimbangkan pemberian kredit kepada Unisoviyet, kata pejabat itu. Ia mempunyai pikiran yang terbuka tentang situasi itu."  
(*Harian Pelita*, Sabtu, 1 Desember 1992, hal.2, kol.7).
- (27) "Kehadiran *Wanita Tuna Susila (WTS)* di Kotamadya Gorontalo, berjamur di musim hujan. Mereka hadir di mana-mana ...."  
(*Harian Fajar*, Sabtu, 18 Januari 1992, hal.2, kol. 7).

Contoh di atas dapat memberikan gambaran bagi kita tentang penggunaan bentuk penghormatan dalam berinteraksi. Melalui penggunaan pilihan kata pada contoh (25) *penjelasan* yang bermakna *pertanggungjawaban*, unsur penghormatan tetap dimunculkan walaupun hal ini dapat mengandung makna laporan atas kesalahan yang dibuat oleh DPP-PDI. Artinya pemerintah melihat hal ini sebagai pelanggaran sehingga menginginkan PDI melaporkan tindakan serupa itu memang betul melanggar UU tentang aturan kampanye, mengapa hanya sebagai *penjelasan*?

Ungkapan di atas mengandung unsur penghalusan dalam bentuk penghormatan karena antara makna *pertanggungjawaban* dengan *penjelasan* berbeda. Menggunakan *pertanggungjawaban* terkesan tidak menghargai lembaga tersebut, sebagai salah satu Organisasi Partai Politik (OPP) yang memiliki otonom. Istilah *pertanggungjawaban* hanya digunakan di depan musyawarah. Penggunaan kata *penjelasan* terkesan tidak

mengambil alih tugas musyawarah OPP tersebut. Depdagri menghargai lembaganya sehingga tidak langsung menggunakan kata tersebut.

Contoh tersebut dapat dibandingkan dengan penggunaan kata *mempertimbangkan* pada contoh (26) yang bermakna *menolak*. Kata *mempertimbangkan* terasa mengandung makna penolakan secara halus atau penerimaan yang bersyarat. Ungkapan tersebut menimbulkan kesan bahwa Amerika dan Unisoviyet masih saja saling menjaga hubungan baiknya.

Pembaca yang cermat dapat menilai berdasarkan konteks tentang adanya penghargaan Amerika kepada Unisoviyet karena dalam permintaan kreditnya tidak langsung ditolak begitu saja. Penolakan yang sifatnya antar lembaga, dalam artian antar negara, biasanya dinyatakan dengan hati-hati, apalagi Unisoviyet adalah salah satu negara *super power* pada waktu itu.

Begitu pula pada contoh (27) melalui penggunaan klausa *Wanita Tuna Susila (WTS)* yang erat kaitannya dengan hubungan antar persona. WTS bukan lembaga, tetapi berada pada perilaku wanita-wanita tertentu. Itulah sebabnya, penggunaan klausa *wanita yang siap berhubungan seks di luar pernikahan* tidak digunakan karena terasa akan meniadakan harga diri wanita tersebut. Walaupun sebenarnya perilaku WTS sangat melanggar nilai-nilai moral yang berlaku di lingkungan kita.

Dari contoh ini, dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan ungkapan eufemistis dalam bentuk penghormatan pada umumnya digunakan oleh orang-orang yang masih menganut saling menghargai antar pribadi atau antar lembaga. Tujuan penggunaan ungkapan ini adalah untuk menjaga hubungan dalam berinteraksi antar sesama, baik dalam bentuk status sosial yang sama maupun dalam status sosial yang berbeda.

#### 4.7 Kesimpulan

Bentuk-bentuk ungkapan eufemistis atau eufemisme berdasarkan data yang diperoleh ternyata sangat beragam. Dari lima kategori yang menjadi dasar dalam mengklasifikasi bentuk-bentuknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.7.1 Penggunaan eufemisme pada kategori kritikan pada umumnya digunakan kalangan cendekiawan, termasuk pengelola pers atau wartawan. Ungkapan semacam ini, lebih menitikberatkan pada setiap peristiwa atau perilaku yang salah atau menyimpang dari kebiasaan masyarakat lingkungannya. Tujuan penggunaan ungkapan ini adalah agar perubahan yang terjadi atas peristiwa, baik yang masih terlaksana maupun yang telah terlaksana. Dengan halus, para pengkritik menyampaikan bahwa sesungguhnya masyarakat tidak siap dikritik secara langsung.

- 4.7.2 Bentuk eufemisme pada kategori apologi, pada umumnya digunakan oleh kalangan eksekutif atau orang yang lebih banyak berperan dalam pengembangan masyarakat. Ungkapan ini diorientasikan kepada orang-orang yang lebih banyak menaruh kepercayaan kepada penuturnya. Tujuannya adalah agar masyarakat yang ada di lingkungan tersebut tetap mempercayai penutur atas ungkapan yang semacam ini.
- 4.7.3 Bentuk eufemisme dalam kategori retorika, pada umumnya digunakan oleh orang-orang yang melontarkan ide dengan tujuan agar penerima ide tersebut secara tidak sadar menjalankannya, baik yang bersifat perintah maupun sifatnya larangan. Bentuk ungkapan semacam ini ditujukan kepada orang-orang yang sementara menghadapi masalah.
- 4.7.4 Bentuk eufemisme dalam kategori tabu, pada umumnya digunakan oleh masyarakat yang bermoral dan berbudaya. Penggunaan ini sangat terkait pada kepercayaan atau nilai yang dianut. Dalam pers, ungkapan semacam ini dipakai untuk merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan seks dan fungsinya. Tujuannya agar terasa tidak bertentangan dengan etika yang berlaku dalam masyarakat.



4.7.5 Bentuk eufemisme dalam kategori penghormatan, pada umumnya digunakan oleh orang-orang yang terikat dengan etika dalam berinteraksi. Ungkapan ini ditujukan kepada relasi atau mitra dalam kehidupan, baik yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya kelembagaan. Tujuan ungkapan ini adalah menjaga norma, yang bersifat universal maupun yang bersifat lokal yang menjadi kesepakatan bersama. Saling menghargai antar sesama dinyatakan melalui penggunaan ungkapan-ungkapan tertentu yang sesuai dengan norma yang berlaku.

BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengembangan argumentasi yang dirujuk pada data yang tersedia pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1.1 Fungsi kalimat dalam penggunaan eufemisme sangat terikat pada makna struktur atau pada makna gramatikal. Struktur kalimat juga ikut menentukan makna tersebut.
- 5.1.2 Penggunaan bentuk eufemisme tergantung pada siapa, untuk siapa dan keadaan bagaimana ketika ungkapan tersebut dituturkan.
- 5.1.3 Penggunaan eufemisme dalam fungsi kalimat memperlihatkan dua macam bentuk, yaitu bentuk kritikan dan bentuk apologi.
- 5.1.4 Penggunaan eufemisme dalam fungsi kata dapat dilihat dengan terjadinya perubahan makna kata berdasarkan strukturnya. Makna kata baru dapat dipahami setelah membaca kalimat secara keseluruhan.
- 5.1.5 Dari penggunaan fungsi kata terdapat pula bentuk-bentuk eufemisme, yaitu: Apologi, tabu, retoris dan bersifat penghormatan.
- 5.1.6 Penggunaan eufemisme dalam pers terdapat lima

kategori. Dari kelima kategori dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

- a) Kritik pada umumnya digunakan oleh cendekiawan dan wartawan. Ungkapan eufemisme pada kritik lebih menitikberatkan pada setiap peristiwa atau perilaku yang salah atau menyimpang dari kebiasaan masyarakat lingkungannya. Tujuan penggunaan ungkapan seperti adalah memunculkan perubahan yang terjadi atas peristiwa, baik yang sementara berlangsung atau yang telah berlalu. Lewat ungkapan halus, para peneritik dapat menyampaikan kepada objek kritiknya dengan bentuk tidak langsung.
- b) Apologi pada umumnya digunakan oleh kalangan eksekutif atau orang yang lebih banyak berperan dalam masyarakat. Ungkapan ini diorientasikan kepada orang-orang yang lebih banyak menaruh harapan kepada penuturnya. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan nama baik para penuturnya. Ungkapan ini bertujuan untuk pembelaan diri atas kesalahan yang telah dilakukan atau sementara dilakukan.
- c) Retorika pada umumnya digunakan oleh orang-orang yang melontarkan ide dengan tujuan agar penerima ide tersebut melaksanakannya.

- d) Tabu pada umumnya digunakan oleh orang-orang yang sangat terikat pada budaya atau nilai-nilai moral yang berlaku di lingkungan masyarakatnya, Misalnya dalam penggunaan ungkapan mengenai organ seks dan fungsinya.
- e) Penghormatan pada umumnya digunakan oleh orang-orang yang sangat menjaga hubungan, baik hubungan antar person maupun hubungan antar lembaga dalam berinteraksi. Ungkapan tabu sangat terikat pada norma-norma, baik sifatnya universal maupun yang sifatnya lokal.

## 5.2 Saran - Saran

Pengembangan argumentasi pada setiap bab seringkali memunculkan hal-hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar diadakan penelitian lebih jauh mengenai masalah ini. Masalah-masalah yang memungkinkan untuk dikaji lebih jauh, antara lain:

### 5.2.1 Sifat Kajian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan teknik analisisnya yang dipakai bersifat induktif, sifat penelitian adalah kualitatif, Kajian lebih lanjut ternyata memungkinkan pendekatan secara kuantitatif dengan menggunakan kategori pers.

### 5.2.2 Bentuk Kajiannya

Kajian tentang eufemisme ternyata masih memerlukan upaya penelitian yang lebih dalam. Secara keseluruhan, kajian tentang hal ini dapat dilakukan berdasarkan pendekatan morfem, sintaksis dan wacana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Husen. 1978. *Bahasa Indonesia as a Unifying Language of Wider Communication: a historical and Sociolinguistics Persfective*. Unpublished Dissertation. Manila.
- Abdullah, Taufik. "Eufemisme dalam Pernyataan Politik, Pertanda Budaya Politik Dikuasai oleh Pejabat", *Kompas*, tanggal 29 juni 1988.
- Ahmad, Mohd. Thani & Zaini Mohamed Zain. 1988. *Rekonstruksi dan Cabang-cabang Bahasa Melayu Induk*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Alimuddin (ed.). 1990. *Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra*. Malang: Y3.
- Al Qur'an. 1985. Jakarta: Terjemanan Departeman Agama.
- Alwasila, A. Chaedar. 1985. *Linguistik suatu Pengantar*. Bandung: Angkasa.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Sosiologi Bahasa*. Bandung: Angkasa.
- Asyari, Sapari Imam. 1983. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Bautista, Maria Lourdes S. 1979. *Patterns of Speaking in Philipino Radio Dramas : A Sociolinguistic Analysis*. 4-chome Nishigahara, Tokyo : Institute for The Study of Languages and Culture of Asia Africa.
- Bloomfield, Leonard. 1933. *Language*. New York, Chicago: Holt, Rinehart and Winston.
- Blount, Ben G. 1974: *Language Culture and Society*. Massachusetts, USA : Winthrop Publisher, Inc.
- Burling, Robbins. 1970. *Man's Many Voice Language in Culture Context*. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1985. *Kongres Bahasa Indonesia IV*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia.
- Echols, John M. & Shadily Hassan. 1984. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Gramedia.

- Echols, John M. & Shadily Hassan. 1984. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Efendy, Anong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandarmaju.
- Enre, Fachruddin A. (ed.) dkk. 1984. *Bahasa Indonesia*. Buku Pegangan Mata Kuliah Dasar Umum. Ujung Pandang: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Ujung Pandang.
- Framkin, Victoria & Robert Rodman. 1978. *An Introduction to Language*. New York : Holt, Rinehart and Winston.
- Furchon, Arief (Alih Bahasa). 1982. *Statistik untuk Peneliti Bahasa*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Gandhi, Ny. ML. 1985. *Undang-Undang Pokok Pers*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gleason, H.A. 1961. *An Introduction to Descriptive Linguistics*. New York : Holt, Rinehart and Winston.
- Halim, Amran. "Pembinaan Bahasa Indonesia", *Analisis Kebudayaan*, nomor 3 Tahun 1981/1982.
- Hamka. 1965. *Tafsir Al Azhar Juz 14*. Jakarta: CV. Bulan Bintang.
- Harian Masa Kini, "Gejala Eufemisme oleh Pejabat Menciptakan Pola Pikir ABS", tanggal 27 Agustus 1988.
- Harmoko. 1988. "Peningkatan Komunikasi yang Efektif dengan Bahasa Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional". *Nakalah*. Jakarta: Kongres Bahasa Indonesia V.
- Hasnawati. 1988. "Kerancuan Bahasa Indonesia dalam Surat Kabar", *Skripsi*. Ujung Pandang: Fakultas Sastra Unhas.
- Hoeve, Van (diterjemahkan oleh Hassan Shadily). 1980. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Holman, Hugh. 1960. *A Handbook to Literature*. New York: The Odyssey Press.
- Hudson, R.A. 1986. *Sociolinguistics*. New York: Cambridge University Press.
- Jespersen, Otto. *Language Its Nature, Development and Origin*. New York: The Macmillan Company.

- Kadir B, Abd. (Penyunting). 1989. *Informasi Kebahasaan*. Ujung Pandang: Panitia Bulan Bahasa Universitas Hasanuddin.
- Kayam, Umar, "eufemisme", *Tempo*, tanggal 27 Agustus 1988.
- Kellerman, Hanry. 1972. *Group Psycho Therapy and Personality, Intersection Structures*. New York: Grune Strattan.
- Kempson, Ruth M. 1984. *Semantics Theory*. New York : Cambridge University.
- Keraf, Gorys. 1980. *Komposisi*. Ende-Flores : Nusa Indah.
- Kleden, Ignás. "Eufemisme Bahasa, Konsensus Sosial dan Kreativitas Kata", *Prisma*, nomor 11, Desember 1978. Jakarta: LP3ES.
- , 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Kridalaksana, Harimurti. 1983. *Kamus Linguistik*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Kuntowijoyo. 1991. "Peranan Budaya dalam Pengembangan Pers Pancasila", *Reporter*, nomor 16/tahun III/Agustus-September 1991. Jakarta: Lembaga Pers Indonesia.
- Larson, Mildred L (Penerjemah Kencanawati Taniran). 1989. *Penerjemahan Berdasarkan Makna: Pedoman untuk Pemadanan Akar Bahasa*. Jakarta: Arcan.
- Leech, G. 1983. *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- , 1987. *Semantics Study of Meaning*. England: Penguin Books.
- Masduki, Muhammad & Wahyu. 1987. *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Moeliono, Anton M. 1986. *Santun Bahasa*. Jakarta : Gramedia.
- dkk. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pembangan Bahasa Indonesia Depdikbud RI.
- , "Bahasa dan Struktur Sosial", *Analisis Kebudayaan*. Nomor 3 Tahun 1981/1982.
- Moerdiono. 1988. "Bahasa Indonesia dalam Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan", *Makalah*. Jakarta : Kongres Bahasa Indonesia V.



- Muntansyir, Rizal. 1988. *Filsafat Bahasa*. Jakarta: Prima Karya.
- Nababan, P.W.F. "Bahasa dalam masyarakat dan Pendidikan". *Analisis Kebudayaan*. Nomor 3 Tahun 1980/1981.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Sosiolinguistik*. Jakarta : Gramedia.
- Natsir, M. 1988. *Fiqhud Da'wah*. Jakarta : Media Da'wah.
- Newcomb dkk. 1985. *Psikologi Sosial*. Bandung: Diponegoro.
- Oemaryati, Boen S. "Gaya Bahasa dan Dampaknya dengan Retorika Bung Karno Sebagai Kasus", *Analisis Kebudayaan*. Nomor 3 tahun 1981/1982.
- Palmer, F.R. 1986. *Semantics* Secand Edition. Combridge: Combridge University Press.
- Parret, H., Sbisa, M. & Vorschueren, J. (eds). 1981. *Possibilities and Limitation of Pragmatics: Proceeding of The Conference on Pragmatics at Orbino, July 8-14, 10979*. Amsterdam: Benjamins.
- Pei, Mario. 1973. *The New Grolies Webster International Dictionary of The English Language*. New York: Grolier Interporated.
- Purwo, Bamang koswanti. 1984. *Dieksi dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1975. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1984. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Karya.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Karya.
- Ritzer, George (Alimandan penyadur). 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali.
- Samarin, William J. 1988. *Ilmu Bahasa Lapangan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Setiawan, R. 1989. *Enksiklòpedi Indonesia (seri 5)*. Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka.

- Siregar, Bahren Umar. 1988. *Beberapa Aspek Linguistik dalam Pengajaran Bahasa*. Jakarta : Kongres Bahasa Indonesia V. Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia Depdikbud RI.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Kamus Sosiologi*. Jakarta : Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.
- Steinberg, Denny D. 1982. *Psycholinguistics Language Mind and World*. New York : Longman.
- Stokhof, W.A.L. 1986. *The Sama/Bajau Language In The Lesser Sunda Islands*. Canberra : Departemen of Linguistics Research School of Pacific Studies The Australian University.
- Stuart, Teresa. 1978. *Communication Strategies*. Laguna: Departement of Development Communication UPLB.
- Subadio, Hariati. "Peranan Bahasa Sansekerta terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia", Analisis Kebudayaan. Nomor 3 tahun 1980/1981.
- Subroto, D. Edi. 1988. *Relasi Semantik Sinonimik dan Hiponik Kata-kata Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia Depdikbud RI.
- Suharno, Ignatious & Kenneth L. Pike (ed.). 1976. *From Baugi to Indonesian Studies in Linguistics*. Irian Jaya: Regions Press.
- Susanto, Astrit S. 1982: *Komunikasi Temporer*. Bandung: Binacipta.
- Taha, Zainuddin. 1984. "Satu Wacana, Dua Bahasa: Kendala-kendala Sociolinguistik Alih Kode Bahasa Bugis-Bahasa Indonesia", *Desertasi*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.
- Tannen, D. 1979. "Ethicity as Conversational Style", *Working Papers in Sociolinguistics*, 55, Austin, Texas: South West Educational.
- Toffler, Alvin. 1990. *Future Sock*. New York: Bantam Books.
- Trudgill, Peter. 1983. *Sociolinguistics an Intoduction to Language and Society*. New York : Penguin Books.

Ullmann, Stephen. 1983. *Semantics an Introduction to The Science of Meaning*. Oxford : Basil Blac Well.

Verhaar, J.W.M. 1979. *Pengantar Linguistik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Wardhaugh, R. 1985. *How Conversation Works*. Oxford : Basil Block Well.

-----, --. 1986. *An Introduction on Sociolinguistics*. Oxford: Basil Block Well.

Widodo, J.W. (ed.). 1990. *Menuju Masyarakat Baru Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Widyamartaya, A. 1990. *Seni Menggayakan Kalimat*. Yogyakarta: Kanisius.